

**AGAMA DAN POLITIK**  
**(STUDI TENTANG MAJLIS DZIKRUL GHOFILIN**  
**‘MANTAB’ KABUPATEN KEBUMEN**  
**SEBAGAI MEDIA SILATURRAHIM POLITIK)**

**Oleh:**

**H. Muhammad Bahrul Ilmie**

**Slamet Mujiono**

**LAPORAN PENELITIAN**

**KEBUMEN**

**2009**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Penelitian.....	2
C. Tinjauan Pustaka.....	2
D. Kerangka Teoritis.....	4
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II : KABUPATEN KEBUMEN: SEBUAH KOTA DI JAWA TENGAH.....	 9
A. Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen.....	9
B. Kondisi Ekonomi dan Politik.....	10
C. Kondisi Sosial dan Kependudukan .....	13
D. Kondisi Keagamaan.....	16
BAB III : MAJELIS DZIKRUL GHOFILIN DALAM MELAK- SANAKAN AKTIVITAS RUTINNYA.....	 19
A. Keberadaan Majelis Sema'an dan mujahadah Dzikrul Ghofilin `Mantap` Kebumen.....	 19
B. Tahapan Permohonan Sema'an dan mujahadah Dzikrul Ghofilin.....	 22

C.	Prosesi Sema'an dan mujahadah Dzikrul Ghofilin.....	25
D.	Substansi Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin.....	28
<b>BAB IV</b>	<b>: FAKTOR YANG MENDORONG KETERLIBATAN PARA PELAKU POLITIK (PARTISIPAN) DALAM AKTIVITAS MAJLIS DZIKRUL GHOFILIN.....</b>	<b>32</b>
A.	Dasar/ prinsip yang diyakin.....	32
B.	Pola Keterlibatan sebagai Partisipan.....	33
C.	Motivasi Kepentingan individual dan kelompok.....	37
D.	Pemaknaan Mujahadah Dzikrul Ghofilin: Subordinasi dan Paradoksi dalam keberagamaan masyarakat.....	41
<b>BAB V</b>	<b>: PERSINGGUNGAN AGAMA DAN POLITIK.....</b>	<b>46</b>
A.	Perubahan dinamika politik.....	46
B.	Respons masyarakat luar terhadap Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin.....	48
C.	Majlis Dzikrul Ghofilin Sebagai Media Silaturahmi Politik.....	50
<b>BAB VI</b>	<b>: KESIMPULAN.....</b>	<b>53</b>
	<b>BIBLIOGRAFY.....</b>	<b>57</b>

## ABSTRAKSI

Penelitian ini difokuskan melihat keberadaan Sema'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen yang mempengaruhi dinamika agama dan politik di Kabupaten Kebumen, sehingga ia merupakan ikhtiar untuk melihat bagaimana proses munculnya ritual keagamaan Islam di ruang publik, yang tidak serta merta mengisyaratkan menguatnya pengaruh Islam atas politik.

Majlis dzikir ini selalu dilakukan setiap malam Kamis Pon di pedesaan sebagai kantong basis ummat. Agaknya Majlis ini memiliki kecenderungan memobilisasi ummat beragama dalam prosesinya yang penuh dengan idiom, simbol dan logika keagamaan, bahkan menjadi even bagi agama itu sendiri untuk bersinggungan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat dan politik, karena merupakan hal yang dipandang cukup efektif dan efisien untuk terjadinya pertukaran (tawar menawar) kepentingan antar pihak yang terlibat, terlebih ketika menjelang pemilu (pejabat publik).

Guna mendiskripsikan secara mendalam keberadaan majlis dzikir ini, penting mencermati sejarah dan aktivitasnya; bagaimana majlis ini tumbuh menjadi magnet sosial, politik dan keagamaan masyarakat Islam Kebumen. Yang terpenting adalah mencermati komposisi sosial yang terlibat di dalamnya; siapa saja, dari latar mana, dan apa "motif" kepentingan yang menggerakkan mereka untuk aktif di sana, serta bagaimana mereka memaknai keberadaan sema'an dan mujahadah; dan keterlibatan mereka di dalamnya, bahkan lebih jauh mencermati bagaimana orang luar merespon keberadaan Majlis itu dan memaknai keterlibatan orang-orang yang aktif di dalamnya.

Fenomena Majlis Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kebumen ternyata menunjukkan dinamika sekaligus salah satu komodifikasi dan aktualisasi agama yang semakin meningkat di era reformasi dalam memfasilitasi kehadiran idiom, simbol dan logika keagamaan di ruang publik.

Key Word: Dzikirul Ghofilin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sema'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah salah satu khazanah ritual keagamaan masyarakat Islam, yang pada dasarnya merupakan sumbangan positif bagi bangunan peradaban hidup kemanusiaan. Fenomena marak dan meriahnya Sema'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen, yang dilaksanakan oleh sebuah kepengurusan dimenunjukkan dinamika sekaligus salah satu komodifikasi dan aktualisasi agama (nilai keberagamaan) yang semakin meningkat di era reformasi dalam memfasilitasi kehadiran idiom, simbol dan logika profetik keagamaan di ruang publik.

Eksistensi agama dan strukturnya tidak berada di ruang hampa, tetapi berada pada suatu ruang sistem nilai sosial budaya, gejala sistem sosial, dan wujud kebudayaan. Masyarakat kebumen umumnya masyarakat agraris, dan memiliki kecenderungan pemahaman Paternalistik, maka adalah wajar bila agama secara substansial harus bersentuhan (bersinggungan) melalui proses sosial (silaturahmi) dengan berbagai elemen kepentingan, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang bersifat fisik-biologis, sosial politik, bahkan kebutuhan fundamental lainnya yang bersifat esensial. Namun persinggungan dimaksud, bisa jadi (diduga) akan kontra produktif bila mujahadah dzikir yang dimotori oleh Kyai H. Mohammad Nashiruddin Al Mansur selaku Ketua I Dewan Harian sekaligus selaku Bupati Kebumen, bila dilakukan di kantong-kantong basis "umat" dan sekaligus 'dimuati' oleh berbagai kepentingan, terlebih ketika menjelang pemilu (pengisian jabatan publik) misalnya.

Aktivitas kepengurusan Majelis Sema'an Al-Qur'an dan Dzikirul Ghofilin 'Mantab' di Kebumen, agaknya memiliki kecenderungan selalu memobilisasi massa (masyarakat) dalam prosesnya yang penuh dengan idiom, simbol dan logika keagamaan. Keberhasilan dalam setiap aktivitasnya, menjadi magnet bagi pelaku politik praktis, pejabat publik daerah (birokrat) dan berbagai komponen masyarakat lainnya, hal ini 'dipandang' cukup efektif untuk terjadinya even pertukaran (tawar-menawar) kepentingan, bahkan even bagi agama itu sendiri untuk semakin memperjelas posisi bersinggungan dengan aspek-aspek kehidupan secara umum.

Relevansi dinamika yang melingkupi pelaksanaan sema'an dan mujahadah dzikir sebagai arena persinggungan berbagai kepentingan, perspektif studi penelitian agama sebagai gejala sosial-budaya adalah topik bahasan yang sangat *urgens* dan *signifikansi*, karena subyek penelitian yang cukup luas dan kompleks. Kompleksitas dimaksud tidak sebatas disebabkan

masalah-masalah yang saling keterkaitan (sistemik), tetapi telah melampaui kajian sosial-budaya pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menjadi sangat bermakna dan penting bahkan menarik, terutama ketika mencermati ritual agama dan keagamaan yang bercampuraduk dan saling bersinggungan secara sistemik dengan berbagai kepentingan sosial kemasyarakatan yang ditandai oleh keterlibatan banyak pihak, walaupun oleh Amin Abdullah dijelaskan “pada level historis-empiris merupakan salah satu persoalan keagamaan kontemporer yang paling rumit untuk dipecahkan” (Abdullah, 2000: 4).

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah “Mengapa mujahadah Dzikrul Ghofilin sebagai salah satu ritual keagamaan menjadi arena tawar menawar kepentingan politik di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah?”, hal ini dapat dirinci dengan tiga pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin dilaksanakan oleh masyarakat Kebumen?
2. Faktor apa saja yang mendorong (*memotivasi*) keterlibatan para pelaku politik (partisipan) dalam aktivitas mujahadah Dzikrul Ghofilin?
3. Bagaimana persinggungan antara kepentingan agama dan politik dalam “Majlis Dzikrul Ghofilin”?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini adalah lingkup area penelitain sosial keagamaan, sehingga lebih difokuskan pada kajian memahami dan memaknai aktivitas keagamaan, yaitu aktivitas Majelis Sema'an Al-Qur'an dan Dzikrul Ghofilin MANTAB Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sebagai sebuah ritual keagamaan yang diduga berpotensi menjadi arena tawar menawar kepentingan politik (terindikasi). Penelitian keagamaan di Kebumen bukanlah kali pertama, karena ada beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi awal untuk memahami gejala sosial-budaya keagamaan yang terjadi pada suatu obyek penelitian.

*Pertama*, Mokhamad Mahfud (2002) dalam tesisnya berjudul “Profil Kyai Mohammad Nashiruddin Al Mansur: Studi Kasus Munculnya Tokoh Kyai Pada Masyarakat Desa Kutosari Kebumen”. Secara umum berupaya mendeskripsikan eksistensi pemikiran dan tindakan kiai Muhammad Nashiruddin di tataran lokalitas Kebumen sebagai salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), anggota DPRD terpilih dari PKB pada pemilu pertama pasca-Orde Baru pada 1999, hingga kemenangan PDI-P mengantar Rustriningsih selaku ketua DPC PDI-P Kebumen dan puteri

seorang tokoh nasionalis lokal ke posisi Bupati Kebumen dan KH. Mohammad Nashiruddin AM sebagai wakil bupati. Deskripsi tentang majlis Dzikrul Ghofilin tidak begitu banyak dibahas, terlebih tentang dinamikanya. Barangkali karena masih dipahami sebagai bagian kecil dari aktivitasnya (fokus penelitian).

*Kedua*, Sidik Jatmika (2005) dalam disertasinya berjudul “Kiai dan Politik Lokal: Studi Kasus Reposisi Politik Kiai NU Kebumen Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi”. Disertasi ini mendeskripsikan secara mendalam aspek dinamika politik Kiai-kiai NU (termasuk kiai Mohammad Nashiruddin AM) dalam konteks sejarah dan lokalitas perspektif politik, terutama peranannya masing-masing, baik konteks kenegaraan maupun konteks keagamaan. Namun karena fokus penelitian pada reposisi politik kiai-kiai NU dalam proses perluasan posisi, yang semula berperan sekedar perantara budaya (*cultural-broker*) terpinggirkan secara politik, sebagai kelompok penekan (pengaruh kebijakan), menjadi sekaligus pemain politik (*political-player*) yang memiliki peran *determinan* dalam formulasi dan eksekusi keputusan politik era transisi reformasi, maka dalam penelitian ini lebih dimaknai kiai sebagai pendorong partisipasi aktif masyarakat dan sekaligus pelaku dalam pembangunan, hal ini semata sebagai ungkapan dinamika pergerakan atau reaksi atas terbukanya akses partisipasi untuk kepentingan publik, yang selama ini (Orde Baru) mengalami ketertutupan dan stagnan.

Adapun temuan deskripsi tentang Majelis Dzikrul Ghofilin dipaparkan hanya bersifat *suplemen* tambahan dari tema besar tentang peran kiai NU di Kebumen, yaitu anggapan sebagai salah satu manfaat bagi kepentingan umat dari berbagai tindakan politik kiai selama masa transisi demokrasi (sejak 1997-2005), ini mencerminkan *elastisitas* dalam aliansi politik, sekaligus konsekuensi sikap kiai memperjuangkan umatnya. Hal ini dapat dicermati bagaimana usaha Nashiruddin untuk mengembangkan Majelis Dzikrul Ghofilin, yang disambut dengan antusias oleh bupati Rustriningsih yang pada awal kepemimpinannya membutuhkan dukungan dan legitimasi dari para tokoh agama. Dukungan dari masyarakat Muslim Kebumen berbuah ketika dia berhasil memenangkan kembali pilkada pada tahun 2005, untuk masa periode kedua masih berpasangan dengan Nashiruddin.

*Ketiga*, Hasil Penelitian Noorhaidi Hasan (2008) dengan judul “Agama, Gaya Hidup dan Politik di Kota Provinsi Indonesia” dan penelitian (2009) “*Muslim Youth in Provincial Indonesia Religion, Identity and Activism*”. Kedua penelitian ini mendeskripsikan hasil temuan di kota-kota ukuran sedang di Provinsi Indonesia, yang kebetulan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu sample penelitian, yaitu disamping mendeskripsikan aktivisme kaum muda dan LSM Kebumen sebagai cikal bakal pertumbuhan masyarakat Islam demokratis dan pertumbuhan-penguasaan ekonomi masyarakat Muslim, juga sebagian meriview secara implisit tentang Majelis Dzikrul Ghofilin dan mencermati bagaimana upaya Bupati Rustriningsih mengubah citranya sebagai nasionalis abangan yang jauh dari Islam.

Upaya Dra. Hj. Rustriningsih, MSi sepulang dari tanah suci, ia mengadopsi pakaian Muslim dengan memilih jilbab bergaya (mode) masa kini, karena banyak kalangan di Kebumen yang semula ragu mendukung kepemimpinan Rustriningsih dengan alasan *gender* menyambut hangat keputusannya tersebut, hingga simpati bertumbuh di masyarakat Muslim Kebumen. Meski banyak di antara mereka memaknai perubahan penampilan Rustriningsih sebagai bukti pergeserannya menjadi Muslimah yang salih. Hanya beberapa yang mencurigai motif politik di belakang keputusannya.

Mencermati hasil penelitian di atas, dapat dideskripsi secara *analitis-kritis*, bahwa umumnya mencoba memaparkan fenomena sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat Islam Kebumen yang secara umum masih paternalistik, dan sangat menyakini hal-hal yang bersifat irrasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda, karena tujuan penelitian yang akan dicapai, dan sekaligus menjelaskan ada saling keterkaitan antara satu dan lainnya.

Meski demikian, diantara penelitian di atas, ada hal yang terabaikan (belum pernah terdeskripsikan), misalnya “bagaimana Majelis Dzikirul Ghofilin sebagai salah satu majlis ritual keagamaan di Kebumen, yang dalam praktiknya menunjukkan indikasi adanya arena tawar-menawar kepentingan politik”, hal ini beranjak pada asumsi dasar dari mencermati komposisi sosial mereka yang terlibat di dalamnya; siapa saja, dari latar mana, dan apa “pola” keterlibatan, bahkan “motif” yang menggerakkan mereka untuk aktif di sana, serta bagaimana mereka memaknai keberadaan mujahadah Dzikirul Ghofilin dan keterlibatan mereka di dalamnya. Lebih jauh mencermati perubahan dinamika politik, dan bagaimana masyarakat luar merespon keberadaan sema’an dan mujahadah dzikir itu dan memaknai keterlibatan orang-orang yang aktif di dalamnya, hingga menjadi silaturahmi politik.

Terjawabnya permasalahan, suatu kontribusi penelitian yang sangat berarti, paling tidak “ikut melengkapi khazanah ilmiah” tentang deskripsi dinamika sosial keagamaan di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menunjukkan ada kesamaan subyek dan obyek penelitian sebelumnya, dan secara eksplisit telah menunjukkan ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar, yaitu disamping fokus penelitian yang lebih ditekankan pada hubungan konteks “agama dan politik”, dalam arti hubungan kepentingan pelaksanaan mujahadah zikir sebagai ritual keagamaan dan kepentingan pelaku politik (politik praktis) sebagai bagian dari upaya mencari, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik, karena di Majelis zikir adalah sekumpulan individu (masyarakat) yang dapat melegitimasi dominasi (*dominance*) tidak hanya dimata penguasa tetapi juga dimata yang dikuasai.

#### **D. Kerangka Teori**

Zikir atau *Az Zikr* sering dimaknai menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga, mengerti, dan perbuatan baik.<sup>1</sup> Hal ini keluar dari

---

<sup>1</sup> Secara istilah merupakan ucapan lisan, gerakan raga, maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT; upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah dengan selalu ingat kepadanya.

suasana lupa, masuk ke dalam suasana musyahadah (saling menyaksikan) dengan mata hati, akibat didorong oleh rasa cinta yang mendalam kepada Allah SWT (Dahlan, 2003: 2016).

Mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah sebuah kegiatan zikir dalam rangka mengingat-ingat kepada pencipta melalui amalan-amalan (Nawawi, 2008: 86). Menurut kepustakaan Agama, sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah upaya mengingat Allah SWT dan untuk mencari upaya-upaya yang harus dilakukan, sehingga dapat beribadah dengan ikhlas akhirnya mencapai ketenangan batin (Witular, 2004: 37),<sup>2</sup> bahkan ada yang menyebut sebuah kegiatan panyuwonan (permintaan) dengan mengingat kepadaNya.

Guna memahami secara mendalam terhadap sebuah gejala dimaksud, maka diperlukan kerangka teori yang dapat membantu menganalisis terhadap gejala yang ada. Secara sosiologis persinggungan agama dalam struktur sosial kehidupan masyarakat, bukan saja telah melahirkan beragam corak keberagamaan dalam berbagai aliran dan corak pengalaman agama, tetapi lebih jauh membuat persentuhan saling berkait-kalindannya antara kepentingan yang berdemensi keagamaan dengan kepentingan-kepentingan aktual masyarakat seperti kepentingan politik dan bahkan lebih jauh pada kepentingan ekonomi (Nashir, 1999: 108).

Max Weber mendefinisikan politik sebagai komunitas yang tindakan sosialnya ditujukan untuk menyubordinasikan dominasi partisipasi secara terarah terhadap suatu kawasan teritorial dan tindakan orang yang ada di dalamnya...(Ritzer and Goodman, 2009: 157). Pendekatan teoritis terhadap gejala sosial yang menggambarkan gejala saling bersinggungan di atas, Mazhab Weberian memberikan penilaian: bahwa agama pada kenyataannya adalah ekonomi, politik pada kenyataannya adalah agama, dan ekonomi dalam kenyataannya adalah politik (Collins, 1986: 7).

Perspektif Weberian ini, adalah wajar bila Weber seringkali dituduh menguraikan agama secara sempit, sebagai metanarasi mengenai ideologi serta pentingnya ide-ide dalam kehidupan sosial. Artinya sedikit sekali proposisi yang berupaya memahami tujuan Weber, yang bermaksud membahas persoalan rasionalitas dan rasionalisasi kebudayaan (Beilharz, 2005: 365). Konsepsi rasionalisasi budaya tidak sekedar sebagai kekuatan "yang ada di luar sana" yang menghalangi manusia bertindak, ia tidak memiliki konsep pikiran-kelompok. Dalam Agama, rasionalisasi terikat pada kelompok yang konkret, yaitu tokoh agama (Ritzer and Goodman: 154). Mendasarkan ini, semakin memperjelas bahwa agama berwujud dalam bentuk nilai aktual yang terkait dengan struktur kelas, status sosial, partai politik yang memberi makna subyektif dalam kehidupan kolektif masyarakat.

Ketika agama mengaktualisasi dalam kehidupan para pemeluknya, maka keberagamaan itu berada pada *level* masyarakat, yang pada akhirnya agama terintegrasi ke dalam sistem nilai sosial budaya, sistem sosial dan

---

<sup>2</sup>Artinya Mujahadah Dzikirul Ghofilin yang dilaksanakan oleh majlis dzikir dapat dimaknai sebagai sebuah ritual keagamaan sekaligus cerminan sebagai gejala sosial dan budaya guna beribadah kepada Allah hingga akhirnya mencapai ketenangan batin.

wujud kebudayaan fisik, yang kemudian bersinggungan melalui sebuah proses sosial dengan elemen-elemen sosial budaya lainnya (Haedar, 1999: 108).

Asumsi dasar penelitian ini adalah “bagaimana arti penting Majelis Dzikirul Ghofilin ‘Mantab’ bagi gerak sosial, politik dan keagamaan masyarakat Kebumen”. Penting melihat dalam konteks ini faktor yang mendorong Majelis Dzikirul Ghofilin sebagai *transsetter* bagi keberagaman masyarakat Kebumen, yang sejak dulu dikenal agamis walau sebagian kecil masih *abangan*. Dengan cara apa, pelaku-pelaku politik lokal melihat trend santrinisasi (islamisasi) di kalangan masyarakat Kebumen ini sebagai sebuah peluang momentum mencari dukungan dan legitimasi dari para tokoh agama dan masyarakat umumnya; bahkan lebih jauh dampak keberadaan Majelis dzikir ini mempengaruhi dinamika politik di Kebumen, baik dalam konteks pemilu, pilpres dan pilkada mendatang.

Usaha nyata Kyai Nashiruddin (saat ini penghujung 2009) untuk mempertahankan dan mengembangkan lebih jauh Majelis Dzikirul Ghofilin dalam masa kepemimpinannya, baik dalam konteks majlis dzikir selaku “Ketua I Dewan Harian” maupun konteks kenegaraan selaku “bupati” masih membutuhkan dukungan dan legitimasi dari para tokoh agama dan masyarakat umumnya. Hal ini oleh David Kertzer dijelaskan bahwa politik mempunyai aspek ritual dan simbolik yang mendasar. Ritual menduduki posisi penting, terutama untuk melegitimasi dominasi (*dominance*) tidak hanya dimata penguasa tetapi juga dimata yang dikuasai. Melalui ritual penguasa politik (pemimpin politik) berjuang untuk meneguhkan hak mereka untuk berkuasa dan sekaligus menopang otoritas mereka dalam kekuasaan. Ritual juga dapat berfungsi untuk membangun aliansi politik bagi kaum revolusioner (Kertzer: 1988). Bagi Victor Turner, ritual adalah mekanisme dan sarana yang kuat untuk menyatukan simbol-simbol realitas sosial dengan stimulus emosional (Turner: 1974).

Hal-hal yang dikemas dalam tataran aktualisasi agama dan politik, pada dasarnya membangun justifikasi batiniah, yang secara implisit menjadi legitimasi dasar bagi dominasi itu sendiri, yang oleh Weber diklasifikasikan dalam otoritas *gift of grace* (dominasi kharisma) personal dan luar biasa, ketaatan personal absolut dan keyakinan personal pada wahyu, heroisme atau kualitas lain kepemimpinan individual (Weber, 2009: 93). Namun pada tataran realitas, hal yang memotivasi kepentingan pelaku politik dalam keterlibatan ritual keagamaan berskala besar (kabupaten) tidak sebatas dominasi kharisma, tetapi lebih jauh pada dominasi legalitas, karena keyakinan pada keabsahan *statuta legal* dan “kompetensi” fungsional yang didasarkan pada pranata yang diciptakan secara rasional (Weber, 2009: 93), meski hasil akhir tindakan politik sering kali berada dalam hubungan yang betul-betul tidak memadai dan bahkan sering bertentangan dengan maksud awalnya (Weber, 2009: 138).

Fenomena gerak majlis dzikir yang dimotori Nashiruddin, adalah gejala harmonisasi terhadap proses sekularisasi agama,<sup>3</sup> yang oleh Donald E. Smith dijelaskan pada tatanan karakteristik *Polity-Separation Secularization*, yakni proses pemisahan jagad politik dari agama, ideologi dan struktur organisasi keagamaan (Smith, 1970: 11; Latif, 2005: 120) dan *Polity-Expansion Secularization*, yakni perluasan otoritas politik untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam wilayah sosial ekonomi yang sebelumnya berada ditatanan agama (Smith, 1970: 86-88, 97; Latif, 2005: 124).

Sekularisasi konvensional seringkali mengasumsikan bahwa agama dan modernisasi berada dalam hubungan kontradiktif (Turner: 2006, 161), hal ini menunjukkan bahwa sekularisasi tidak hanya melingkupi aspek-aspek kehidupan sosial dan politik saja, tetapi juga telah merambah ke aspek kultur, karena proses tersebut menunjukkan lenyapnya penentuan simbol-simbol integrasi kultural. Meski pengertian lain, sekularisasi adalah suatu ideologi yang menunjukkan sikap penilaian negatif terhadap agama (Clarke, 1998: 37).

Mendasarkan pada beberapa teori di atas, diharapkan dapat membantu memahami dan menganalisis terhadap gejala yang ada secara mendalam, mengingat globalisasi memaksa pembentukan definisi baru terhadap berbagai hal dan memunculkan praktik kehidupan yang beragam, tidak terkecuali praktik agama dan keagamaan mengalami perubahan (termasuk motivasi kepentingan), hal ini bukan karena agama mengalami proses kontekstualisasi sehingga agama *embedded* di dalam masyarakat, tetapi juga karena budaya yang mengkontekstualisasi agama itu merupakan budaya global, dengan tata nilai berbeda (Abdullah, 2009: 107).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pemilihan Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dengan pertimbangan Kebumen sebagai daerah yang tercatat sebagai kabupaten termiskin keempat dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, namun sekalipun digambarkan sebagai kabupaten termiskin keempat, namun sering dikenal sebagai kota "*santri*" dengan kuranglebih 98,8% penduduknya beragama Islam, Kebumen tidak pernah menjadi pijakan yang kukuh bagi partai-partai Islam. Meski tidak sekalipun sejak pemilu pertama tahun 1955 partai Islam memenangi perolehan suara. Tetapi kyai memiliki pengaruh yang penting di Kebumen, bahkan data terakhir

---

<sup>3</sup>Sekularisasi adalah konsep sosiologi yang mengacu pada suatu aspek proses kejadian dalam sistem sosial. Ini merupakan term yang netral secara etika, yang digunakan untuk menggambarkan fakta "obyektif". Sekularisasi seringkali diartikan sebagai upaya pemisah antara urusan negara (politik) dan urusan agama, atau pemisah antara urusan duniawi dan ukhrawi. Jadi sekularisasi dipahami banyak orang sebagai pembebas manusia dari agama dan metafisik artinya bahwa terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius yang suci, dari pandangan dunia semu, atau dari semua mitos supra-natural.

menunjukkan, terdapat 131 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh 26 kecamatan.

## 2. Data yang dibutuhkan

Guna mendiskripsikan secara mendalam keberadaan Majelis zikir ini, maka dibutuhkan data kualitatif, sehingga penting mencermati sejarah, keberadaan majlis, hingga aktivitas, dan anggota-anggota yang terlibat; bagaimana Majelis ini tumbuh menjadi magnet sosial, politik dan keagamaan masyarakat Islam Kabupaten Kebumen. Yang terpenting adalah melihat tahapan-tahapan kegiatan, komposisi aktor sosial yang terlibat; siapa saja, dari latar mana dan; apa dasar/ prinsip yang diyakini sekaligus pola keterlibatan hingga motivasi yang menggerakkan untuk terlibat aktif di sana, serta; bagaimana memaknai keberadaan Majelis dzikir dan keterlibatan mereka di dalamnya dan perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dampak, bahkan bagaimana orang di luarnya merespons keberadaan Majelis itu dan memaknai keterlibatan orang-orang yang aktif di dalamnya.

## 3. Sumber-sumber Data

Sumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, yang dalam hal ini menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Tiga orang pengurus kabupaten Majelis sema'an Al-Qur'an Dzikirul Ghofilin Kabupaten Kebumen
- b. Satu orang pelaku politik praktis dan satu orang pejabat publik daerah yang terlibat aktif pada Majelis/ mujahadah Dzikirul Ghofilin
- c. Dua orang tokoh masyarakat sebagai pemerhati
- d. Dua orang jama'ah aktif mujahadah dzikirul Ghofilin

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data utama melalui metode observasi lapangan (mujahadah zikir), wawancara mendalam terhadap sejumlah informasi yang dipilih secara *purposive* serta penggalian dokumentasi terhadap berbagai data yang dibutuhkan. Adapun data pendukung melalui penggalian literatur yang relevan dengan topik persoalan.

## 5. Teknik Analisa Data

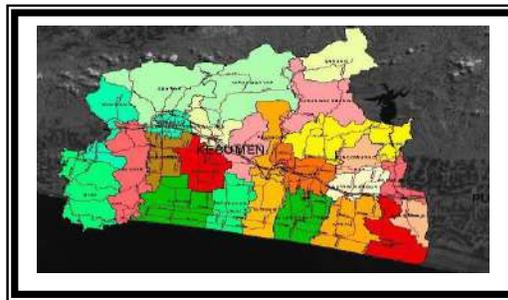
Teknik analisa data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah-langkah, yaitu: Data yang telah terkumpul dalam bentuk teks kemudian diinventarisir dan dianalisa secara *diskriptif analitis kritis* untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, terutama dilakukan dengan mencari pola, tema hubungan, dan persamaan hal-hal yang telah terjadi. Khusus data yang masih kabur dan diragukan akan diverifikasi, yaitu ditinjau ulang pada catatan lapangan atau peninjauan kembali, serta diskusi dengan sejawat, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang lebih baik.

## BAB II

### KEBUMEN: SEBUAH KABUPATEN DI JAWA TENGAH YANG SEDANG BERKEMBANG<sup>1</sup>

#### A. Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Daerah atau wilayah Kabupaten memiliki wilayah pantai dan juga terdapat wilayah pegunungan. Ketinggian berkisar 0997,5m di atas permukaan laut. Tepatnya berada di pesisir selatan samudera Indonesia, sehingga bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu, bahkan di selatan daerah Gombong terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.



Gambar: Peta Kabupaten Kebumen (Doc: KebumenKab.go.id)

Secara administratif Kabupaten Kebumen dengan Ibukotanya Kebumen dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo;
- b. Sebelah Timur: berbatasan dan Kabupaten Purworejo;
- c. Sebelah Selatan: Samudra Indonesia, serta;

---

<sup>1</sup>Informasi tentang Kabupaten Kebumen sebagai setting penelitian, umumnya disimpulkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2008 kepada DPRD Kebumen dan “Kebumen dalam Angka 2008” serta data sebelumnya “Kebumen dalam Angka 2004” di [www.kebumenkab.go.id](http://www.kebumenkab.go.id).

d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 Hektar atau 1.281,155 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 26 Kecamatan. Secara keseluruhan terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 RW dan dibagi menjadi Rukun Tetangga (RT) sebanyak 7.027 RT. Kelurahan yang berada di Kabupaten Kebumen terdapat di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kebumen, Gombang dan Karanganyar. Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Kebumen.

Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 tercatat 39.768,00 hektar atau sekitar 31,04% sebagai lahan sawah dan 88.343,50 hektar atau 68,96% sebagai lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (46,18%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (33,82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 35.985,00 hektar (40,73%) tegalan/ kebun seluas 28.777,00 hektar (32,57%) serta hutan negara seluas 16.861,00 hektar (10,09%) dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kebumen adalah masyarakat agraris.

## B. Kondisi Ekonomi dan Politik

### 1. Kondisi Ekonomi Masyarakat dan Daerah

Kabupaten Kebumen memiliki hamparan sawah yang luas dan tahun 2008 mampu meningkatkan produksi padi hingga 434.394,33 ton bila dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 371.803,35 ton. Ironisnya, berdasarkan data BPS dan hasil sensus ekonomi tahun 2005 mencapai 48,28% atau sejumlah 132.987 rumah tangga miskin,<sup>2</sup> pada sisi lain tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dan mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, bahkan berdasar data penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2007, 46% penduduknya masih tergolong miskin dan berkorelasi meningkatnya pencari kerja.

Secara umum kondisi ekonomi daerah tercermin pada pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 sebagaimana umumnya kabupaten di Indonesia terdiri atas, *pertama*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

---

<sup>2</sup>Kebumen juga tercatat sebagai kabupaten termiskin keempat dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

pendapatan asli daerah. Dan *kedua*, Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang sah, yang meliputi bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah.

Estimasi target Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008 sebesar Rp. 858.269.160.674,62. Namun realisasinya hanya mencapai Rp. 856.501.765.708,00, atau sebesar 99,79% sehingga terjadi kekurangan pendapatan daerah sebesar 1.767.394.966,62. Meski Pengelolaan keuangan sudah disesuaikan dengan prinsip umum yang berlaku, yaitu proses transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang secara kontinyu melalui media komunikasi program “Selamat Pagi Bupati” di Ratih TV dan In FM, bahkan melalui publikasi media cetak. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang realisasinya hanya Rp. 784.992.193.195,00, maka tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 9,10%.

Kondisi makro perekonomian tahun 2008 cenderung melambat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mencapai 3,89% dengan angka inflasi 14,21%. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah 0,63% dibandingkan tahun 2007, angka inflasi dibawah dua digit dan suku bunga perbankan pada level yang kondusif, sehingga secara bertahap mendorong permintaan dan relasi kredit baik untuk konsumsi maupun investasi.

Adapun potensi unggulan daerah sebagai sumber pendapatan secara berkelanjutan adalah: Perkebunan kelapa dan berupa komoditi perkebunan tanaman pandan; Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura); Peternakan; Perhutanan; Perikanan dan Kelautan; Pertambangan; Pariwisata; Perhubungan; Industri dan Perdagangan. Meski kaya dengan potensi alam, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat nampaknya menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti, karena jumlah rumah tangga miskin (angka kemiskinan) tahun 2005 sudah mencapai 48,28% atau sejumlah 132.987 rumah tangga, barangkali tahun 2009 ini semakin meningkat bila didasarkan pada kondisi ekonomi makro yang terjadi di Indonesia.

## 2. Kondisi Politik dan Kebijakan Daerah

Guna kelangsungan kepemimpinan Kabupaten Kebumen saat ini (akhir 2009) dipimpin oleh seorang Bupati bernama KH. Mohammad Nashiruddin al Mansur sebagai kelanjutan dari kepemimpinan bupati sebelumnya Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan wakilnya KH. Mohammad Nashiruddin Al Mansur (2005-2010) untuk masa periode yang kedua. Sehubungan dengan terpilihnya Rustriningsih selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilgub tahun 2009 mendampingi Bibit Waluyo, maka

kepemimpinan dilanjutkan oleh wakilnya sebagai Bupati Kabupaten Kebumen dan dalam perjalanan waktu didampingi oleh Rustriyanto, SH (fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen sekaligus adik kandung Rustriningsih) sebagai wakil bupati.

Konteks demokratisasi bernegara, pilihan masyarakat Kebumen terhadap kebutuhan 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai anggota dewan daerah terpilih pada pemilu (legislatif) 2009, yang telah diikuti hanya 22 Partai Politik, telah menghasilkan komposisi keterwakilan partai besar dan memiliki stratifikasi pendidikan yang berbeda-beda (SDM bervariasi), yaitu:

- a. Partai Demokrat 7 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (1), SLTA (5) dan tidak ada keterangan (1) orang;
- b. PAN 5 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (3), Diploma-III (1) dan SLTA (1) orang;
- c. PKS 2 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (1) dan SLTA (1) orang;
- d. PKNU 2 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (1) dan Diploma-II (1) orang;
- e. Golkar 7 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (4) dan SLTA (3) orang;
- f. PDIP 15 kursi, dengan Strata-2 (1), Strata-1 (6), Diploma-I (1) dan SLTA (7) orang;
- g. Partai Gerinda 1 kursi, dengan pendidikan SLTA (1) orang;
- h. PKB 5 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (2), Diploma-III (1), SLTA (1) dan tidak ada keterangan (1) orang;
- i. PPP 6 kursi, dengan pendidikan Strata-1 (3), Diploma-III (1) dan SLTA (2) orang.

Pilihan masyarakat Kebumen pada Pemilu (pilpres) 2009 menunjukkan, pasangan Megawati-Prabowo (1) memperoleh suara 236.304 (37,69%) dan diunggulkan di 4 kecamatan; pasangan SBY-Boediono (2) memperoleh suara 344.013 (54,88%) dan diunggulkan di 22 kecamatan; dan pasangan M. Yusuf Kala-Wiranto (3) hanya memperoleh suara 46.580 (7,43%) dari jumlah suara total yang sah 626.897 (100%), dan suara yang tidak sah 47.366 (7,56%).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010, menetapkan Visi “Dengan dukungan masyarakat yang agamis dan berkualitas, untuk mewujudkan perekonomian Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi”. Guna mencapai visi yang dirumuskan dijabarkan ke beberapa misi, salah satunya adalah: “Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, pendidikan”. Agenda utama pembangunan kurun waktu 2006-2010 mencakup pembangunan pendidikan; kesehatan; reformasi birokrasi; prasarana wilayah; penataan ruang dan lingkungan hidup; penanggulangan kemiskinan dan

kesejahteraan sosial; pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan; pariwisata; industri dan perdagangan; ketenagakerjaan, dan; koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Mencermati beberapa agenda pembangunan, arah kebijakan daerah yang paling menonjol dalam tataran publik adalah agenda pendidikan dan kesehatan, karena pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai salah satu prioritas daerah (komponen faktor pendukung keberhasilan pembangunan), yaitu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

### C. Kondisi Sosial dan Kependudukan

Kehidupan sosial masyarakat Kebumen, umumnya masih sederhana, walau pada sisi tertentu telah dan sedang terjadi proses perubahan-perubahan bentuk ke arah sosok baru (*transformasi*), dari masyarakat agraris dan madya ke masyarakat pramodern atau moderen. Guna memahami kondisi sosial, maka indikator utama yang dipakai adalah kondisi pendidikan dan kesehatan, karena keduanya dipandang sebagai pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus obyek pembangunan.



Gambar: Pendopo Rumah Dinas Kabupaten Kebumen

(Doc: KebumenKab.go.id)

#### 1. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Agama Kabupaten Kebumen, peningkatan sumber daya manusia sekarang ini lebih diutamakan pada memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengecap pendidikan yang seluas-luasnya, terutama pada kelompok umur 7–24 tahun yaitu kelompok usia sekolah.

Ketersediaan fasilitas pendidikan, baik sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia akan sangat menunjang dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan, hal ini dapat dicermati pada data Kebumen dalam Angka 2008 (data terakhir), sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 626 sekolah dengan jumlah 18.649 peserta didik dan didukung oleh 1.115 guru; dan Raudhatul atfal (RA) berjumlah 79 sekolah dengan jumlah 2.359 peserta didik dan didukung oleh 233 guru;
- b. Sekolah Dasar (SD) berjumlah 822 sekolah dengan jumlah 133.191 peserta didik dan didukung oleh 7.457 guru; dan Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 101 madrasah dengan jumlah 13.783 peserta didik dan didukung oleh 9.32 guru;
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 112 sekolah dengan jumlah 47.874 peserta didik dan didukung oleh 2.716 guru; dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 78 madrasah dengan jumlah 18.379 peserta didik dan didukung oleh 1.479 guru;
- d. Sekolah Menengah Atas/ Umum berjumlah 87 sekolah dengan jumlah 10.175 peserta didik dan didukung oleh 717 guru; SMK (rumpun ekonomi) berjumlah 18 sekolah dengan jumlah 7.954 peserta didik dan didukung oleh 427 guru; rumpun teknik berjumlah 27 sekolah dengan jumlah 15.451 peserta didik dan didukung oleh 887 guru; rumpun ekonomi & teknik berjumlah 10 sekolah dengan jumlah 5.296 peserta didik dan didukung oleh 308 guru; dan Madrasah Aliyah berjumlah 20 madrasah dengan jumlah 3.907 peserta didik dan didukung oleh 178 guru;
- e. Pendidikan setingkat Akademi tahun 2008 berjumlah 3 sekolah dengan jumlah 1.025 mahasiswa dan didukung oleh 58 staf pengajar; dan Pendidikan setingkat Sekolah Tinggi (PT) tahun 2008 berjumlah 4 buah dengan jumlah 2.575 mahasiswa dan didukung oleh 222 staf pengajar;
- f. Pondok Pesantren tahun 2008 berjumlah 130 Pondok Pesantren dengan jumlah 15.011 santri dan didukung oleh 1.746 guru/ ustadz, bahkan lebih jauh ada 170 Madrasah Diniyah, 920 Majelis Ta'lim dan 465 TPQ.

Banyaknya jumlah sekolah yang dikelola swasta daripada negeri, baik tingkat pendidikan prasekolah (TK/RA) hingga Pendidikan Tinggi dan Pondok Pesantren, nampaknya belum menjamin persoalan pendidikan masyarakat terselesaikan, karena data yang ada masih menunjukkan, belum tuntasnya golongan buta huruf dan masih banyak anak yang berusia antara 7-15 tahun tidak bersekolah, terlebih angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Tingginya angka buta huruf dan putus sekolah ini menjelaskan kenapa 132.987 keluarga di Kebumen (atau 48,28%) tergolong miskin.

Lebih mengejutkan, 37.354 jiwa berstatus pengangguran (pencari kerja) dari total 1.005,724 jiwa Jumlah penduduk usia kerja atau dari total 774.916 jiwa usia produktif. Tingginya angka pengangguran ini juga berkorelasi dengan fakta banyaknya jumlah pekerja migran Kebumen yang mengadu nasib di luar negeri, terutama negeri jiran. Namun demikian, masyarakat Kebumen sekarang sedang berbenah dan berkembang dalam

upaya perbaikan Sumber Daya Manusia dan guna menunjang peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka mensukseskan wajib belajar 9 tahun, bahkan pemerintah daerah tahun 2009 telah mengalokasikan anggaran Rp. 3.500.000.000,00 dan menyalurkan bantuan keuangan sosial pendidikan untuk siswa kurang mampu.

Tentang kesehatan, berdasarkan data Dinas Kesehatan dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hal ini juga dapat dicermati dari data Kebumen dalam Angka 2008 berikut:

- a. Rumah Sakit, berjumlah 7 buah dengan daya tampung/ tempat tidur 686 buah dan didukung oleh 673 tenaga kesehatan, diantaranya 62 dokter umum, 20 dokter spesialis dan 8 dokter gigi serta 39 bidan.
- b. Balai Pengobatan/ Rumah Bersalin berjumlah 38 buah dengan daya tampung/ tempat tidur 162 buah dan didukung oleh 120 tenaga kesehatan;
- c. Puskesmas Perawatan berjumlah 6 buah dengan daya tampung/ tempat tidur 94 buah; Puskesmas Non Perawatan berjumlah 29 buah dan Puskesmas Pembantu 72 buah dan didukung oleh 1.171 tenaga kesehatan.

Kondisi kesehatan masyarakat umumnya masih relatif rendah, tahapan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai telah menjadi pilihan kebijakan, termasuk proses pembangunan Rumah Sakit bertipe B dalam rangka mensukseskan upaya pencapaian Kebumen Sehat 2010. Peranserta masyarakat dengan mendirikan apotek, di beberapa kecamatan di Kebumen, yang hingga sekarang berjumlah 28 buah dan toko obat berjumlah 5 buah, walau masih terkonsentrasi di Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Gombong. Ketersediaan berbagai komponen kesehatan, paling tidak telah mengurangi banyaknya kematian ibu dan bayi karena persalinan serta kematian bayi diluar persalinan. Data mendiskripsikan, bahwa angka kematian ibu karena persalinan selama 2008 hanya menunjukkan 17 kasus, dan kematian bayi hanya 12 kasus, sedangkan kematian bayi diluar persalinan (7 hari – 1 tahun) masih cukup tinggi, yaitu 116 kasus.

## 2. Kondisi Kependudukan

Pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor penentu, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Manajemen kependudukan diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tergolong besar. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tercatat 1.032.226 jiwa, kemudian pada tahun 1990 bertambah menjadi 1.120.882 jiwa, dan pada sensus penduduk tahun 2000 meningkat menjadi 1.164.940 jiwa. Berdasarkan data tersebut, terlihat secara absolut jumlah penduduk mengalami terus bertambah, tetapi bila dilihat dari prosentasi

pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung menurun, karena rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun periode 1980-1990 sebesar 0,78%, dan pada periode 1990-2000 menurun menjadi 0,39%.

Data tahun 2008 penduduk Kabupaten Kebumen telah bertambah menjadi 1.241.437 jiwa atau tumbuh sebesar 0,78%, namun bila mendasarkan data laporan kependudukan per Agustus 2009, yang ditetapkan bulan Nopember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mencapai 1.336.509 jiwa dan disinyalir angka di lapangan dapat menunjukkan lebih besar. Distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan memperlihatkan Kecamatan Kebumen mempunyai penduduk terbanyak, yaitu mencapai 122.702 jiwa atau 9,88% dari total penduduk Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Padureso (pemekaran wilayah Kecamatan Prembun) yaitu sebanyak 14.286 jiwa atau 1,15% dari total penduduk Kabupaten Kebumen.

Kepadatan penduduk (*population Density*) adalah suatu rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Ukuran ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya kepadatan penduduk, tahun 2008 Kabupaten Kebumen mengalami kepadatan mencapai 969 jiwa/km<sup>2</sup> atau tumbuh sebesar 0,73%.

Bila dicermati pada 26 kecamatan yang ada, kepadatan penduduk perkecamatan, menunjukkan 12 kecamatan dengan kepadatan penduduk di atas kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Kecamatan Kebumen, Pejagoan, Alian, Klirong, Petanahan, Buluspesantren, Kuwarasan, Gombang, Karanganyar, Sruweng, Kutowinangun, dan Prembun. Kecamatan Kebumen mempunyai kepadatan penduduk tertinggi (2.191 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk terendah (363 jiwa/km<sup>2</sup>).

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan yang ditunjukkan sex ratio sebesar 102 terdapat di 11 kecamatan yang memiliki sex ratio diatas sex ratio kabupaten, yaitu Kecamatan Ayah, Puring, Petanahan, Klirong, Ambal, Bonorowo, Alian, Pejagoan, Sruweng, Karanggayam dan Sadang.

#### D. Kondisi Keagamaan

Kabupaten Kebumen, masyarakatnya secara umum (kurang lebih 98,8%) beragama Islam, meski terkadang dipahami sebagai Islam Jawa yang fatalistik,<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Islam yang secara umum masih terikat dengan budaya leluhur yang dijalankan secara turun temurun, seperti budaya “selamatan” dengan mengundang tetangga dekat untuk membaca kalimat-kalimat Thaiyibah (zikir dan do’a) setiap ada hajatan tertentu, akan melangsungkan hajatan perkawinan, membangun rumah, pindah rumah, kahamilan 4 bulan, kehamilan 7 bulan, kelahiran anak (disertai aqiqah), sunatan bagi anak laki-laki, bila ada anggota keluarga yang meninggal ada selamatan 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun (haul) bahkan 1000 hari, bahkan fidyahan dan lain sebagainya.

dan terkadang irrasional, tetapi sesungguhnya Kabupaten Kebumen sering dikenal sebagai kota “santri”, bahkan memiliki slogan “Kebumen Beriman”.

Indikator memahami keagamaan masyarakat adalah kesadaran memelihara eksistensi peribadatan (termasuk simbol dan ritual) sebagai cerminan masyarakat yang beragama dan konsekuensi logis dari nilai-nilai keberagamaannya. Sebagai kota yang terletak di pedalaman Jawa, Kebumen barangkali lebih baik digambarkan sebagai tempat subur Islam Jawa yang moderat atau dalam beberapa hal kepercayaan abangan. Militer menggambarkan beberapa kecamatan terpencil di Kebumen sebagai ‘kawasan merah atau abangan’ yang dipercaya sebagai tempat di mana pengaruh komunis pernah berkembang cukup dominan (Hasan, 2009: 4).

Menurut Makhrur AM, Kebumen belum pernah ada cap ‘abangan’, namun bukan berarti tidak ada masyarakat abangan. Masyarakat abangan dapat ditemui di beberapa daerah pesisir dan di daerah pegunungan. Sejatinya kota santri juga kurang tepat, bahkan aneh karena Kabupaten Kebumen dalam sejarahnya tidak pernah dilalui oleh para wali, terlebih tokoh-tokoh agama lain, namun yang ada hanyalah santri-santri dari para wali-wali terkenal zaman dulu, hal ini dapat ditelusuri di beberapa daerah Kebumen banyak ditemukan Pondok Pesantren yang menyebarkan ilmu agama Islam, bahkan beberapa tempat ditemukan makam para alim ulama, yang oleh masyarakat diyakini semasa hidupnya adalah seorang wali.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan desa-desa hingga sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kondisi keagamaan masyarakat menunjukkan masyarakat Islam 1.256.451 jiwa, Krinten 7.395 jiwa, Protestan 4950 jiwa, Budha 2540 jiwa, Hinda 121 jiwa dan lainnya 15 jiwa. Pluralitas keagamaan masyarakat dan mayoritas muslim justru suasana kerukunan hidup beragama yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan menjadi pilihan masyarakat, hal ini tercermin pada sebaran jumlah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Majelis Ta’lim dan TPQ serta tingginya tingkat kesadaran membangun dan memelihara tempat peribadatan, seperti masjid, langgar/ mushalla, gereja dan vihara.

Berdasarkan data Departemen Agama Kebumen, pada tahun 2008 jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Kabupaten Kebumen tercatat:

- a. Masjid 1.289 buah, paling sedikit di kecamatan Bonorowo, Padureso dan Sadang hanya 24 buah, sedangkan yang paling banyak tersebar di Kecamatan Kebumen 89 buah;
- b. Langgar/ mushalla sebanyak 3.632 buah, paling sedikit di Kecamatan Padureso hanya 49 buah, sedangkan yang paling banyak juga tersebar di Kecamatan Kebumen 282 buah;

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Makhrur Adam Maulana, (Mantan Anggota DPRD Kebumen Periode 2004-2009, sekarang Ketua Tanfidziyah DPC PKB Kabupaten Kebumen), tanggal 3 Desember 2009.

- c. Gereja sebanyak 58 buah, paling sedikit di Kecamatan Bonorowo dan Adimulyo hanya 1 buah, sedangkan paling banyak tersebar di Kecamatan Gombong mencapai 11 buah. Namun pada Kecamatan Petanahan, Mirit, Padureso, Alian, Pejagoan, Sempor, Sadang dan Karangsembung tidak ditemukan gereja.
- d. Vihara sebanyak 8 buah, hanya ada pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ayah dan Kebumen masing-masing hanya 1 buah, sedangkan 3 kecamatan lain, Kecamatan Kuwarasan, Rowokele dan Sempor masing-masing 2 buah.



Gambar: Masjid Agung Kabupaten Kebumen (Doc: KebumenKab.go.id)

Dampak lebih jauh, khusus bagi masyarakat Islam adalah banyaknya kegiatan ritual keagamaan, baik difasilitasi secara individu maupun difasilitasi oleh organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Bahkan kesadaran beribadah haji yang didukung oleh kemampuan ekonomi juga telah memperkuat pilihan masyarakat dalam menjaga tatanan agama yang diyakini, hal ini tercermin pada ketentuan kouta haji selalu terpenuhi, bahkan untuk kouta tahun 2010 hingga 2011 sudah penuh dan untuk tahun 2012 pendaftar sudah melebihi angka 1000 jama'ah. Data tahun 2006 mencapai 920 orang jama'ah, tahun 2007 sebanyak 1.049 jama'ah, tahun 2008 sebanyak 883 jama'ah dan terakhir tahun 2009 sebanyak 1.158 jama'ah haji Kebumen. Adapun dominasi pertama masih kisaran umur 60-69 tahun, dominasi kedua kisaran umur 50-59 dan dominasi ketiga kisaran umur 40-49 tahun, sedangkan umur dibawah 39 tahun hanya sebagian kecil. Bila dilihat dari stratifikasi pendidikan, dominasi utama adalah lulusan SD, disusul lulusan SLTA/Akademi/PT dan dominasi terakhir lulusan SLTP.

**BAB III**

**MAJELIS DZIKRUL GHOFILIN**

**DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS RUTINNYA**

A. Keberadaan Majelis Sema'an dan mujahadah Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kebumen

Kehadiran Mujahadah Dzikrul Ghofilin 'Mantab' di Kabupaten Kebumen tidak bisa dilepaskan dari konsepsi tradisi "Ahlussunnah wal Jama'ah" dan sosok Chadzrotus Syech Kyai Hamim Djazuli (atau dikenal dengan Gus Miek),<sup>1</sup> yang oleh KH. Mudzakir (Wonoyoso) dijelaskan bahwa kehadiran Ritual Mujahadah Dzikrul Ghofilin di Kebumen dimulai kurang lebih tahun 1983-an dan dimotori oleh beberapa alumni santri Pondok Pesantren (PP) Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur. Waktu itu semua alumni yang mau pulang kampung mendapatkan amanah dari Gus Miek untuk menjalankan/ mengamalkan Mujahadah Dzikrul Ghofilin.

Ritual Mujahadah Dzikrul Ghofilin Kabupaten Kebumen pada asal muasal nya, menurut KH. Nawawi (Adikarso Kebumen) adalah Amalan (amaliah/ wirid) dari hasil perkawinan ijazah-ijazah para ulama, yang oleh Kyai Hamim Jazuli (Gus Miek), dikumpulkan menjadi satu dan diberi nama Mujahadah Dzikrul Ghofilin. Amalan mujahadah dimaksud berasal dari ulama pertama kali KH. Dalhar Bin Abdurrahman (Watu Congol Muntilan Jawa Tengah) artinya saling memberikan (perkawinan) ijazah atas 6 orang, sehingga aslinya Amalan Mujahadah Dzikrul Ghofilin berasal dari akumulasi enam orang ulama, yaitu:

1. KH. Dalhar Bin Abdurrahman Watu Congol Muntilan.
2. KH. Abdul Hamid Bin Ngusman Banjaragung Kajoran Magelang.
3. KH. Chamid Bin Abdillah Bin Umar Pasuruan Jawa Timur.
4. KH. Achmad Siddiq Jember Rois Syuriah NU.
5. KH. Muhdir Nadzir Banjar Kidul Kediri.
6. KH. Hamim Bin Jazuli Ploso.<sup>2</sup>

Berdasarkan ijazah-ijazah 6 ulama tersebut dikawinkan/ dirangkum oleh Gus Miek menjadi satu, sehingga jadilah mujahadah Dzikrul Ghofilin. Kemudian ditulis oleh KH. Achmad Siddiq, sehingga yang berwenang (*ta'lifnya*) tetap KH. Hamim Jazuli dari Ploso Mojo Kediri yang terkenal dengan sebutan Gus Miek. Hal ini sejalan dengan adanya sebuah tulisan KH. Achmad Siddiq ketika

---

<sup>1</sup>Gus Miek belakangan mendapat julukan sebagai Pendiri dan Tokoh Sentral Sema'an Al Qur'an 'Jantiko Mantab' serta *Mursyid* (Pencipta Tunggal Dzikrul Ghofilin).

<sup>2</sup>Wawancara dengan K.H. Nawawi (Ketua III Dewan Harian Majelis Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen), 30 Nopember 2009.

pertemuan keluarga tanggal 25 Oktober 1986 yang menjelaskan bahwa Aurad “Dzikrul Ghofilin” adalah kepunyaan Kyai Hamid dan Gus Miek, dan Dzikrul Ghofilin adalah hasil proses perangkaian yang terjadi pada bulan Sya’ban oleh orang tiga (Tsulatsi/tritunggal), yaitu: *pertama*, dari Kyai Hamid diberi ijazah membaca Surat Al Fatihah 100 kali dan Asma’ul Husna; *kedua* dari Gus Miek menambah bacaan Istigfar 100 kali, Shalawatan 300 kali dan Tahlil 100 kali, dan: *ketiga*, saya (Kyai Achmad Siddiq) do’a yang terakhir.

Berdasarkan amanah Gus Miek, alumni santri Pondok Pesantren Al-Falah yang berasal dari Kebumen mulai menjalankan rutinitas mujahadah secara bersama-sama, diantaranya yaitu: KH. Wahib Mahfudz dan KH. Yazid Mahfudz (Pengasuh PP Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen), KH. Muntaha Mahfudz (Pengasuh PP Salafiyah Wonoyoso Kebumen), KH. Kahfi (Pengasuh PP Kedadongan Kebumen), KH. Mohammad Nashiruddin Al Mansyur (Pengasuh PP At-Taqwa Kauman Kebumen). Hanya saja kebersamaan mereka sesama alumni akhir-akhir ini sudah jarang ditemukan, kecuali ada moment tertentu. Majelis Dzikrul Ghofilin di Kebumen, pertama kali dipimpin oleh KH. Wahib Mahfudz dan PP Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen dijadikan sebagai pusat informasi, perode berikutnya dipimpin oleh KH. Muntaha Mahfudz, dilanjutkan KH. Yazid Mahfudz, dan sekarang dipimpin oleh KH. M. Nashiruddin Al Mansur.

Perangkat Majelis Sema’an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin ‘Mantab’ Kebumen, secara struktur terdiri dari Dewan Penyantun, Dewan Harian dan dibantu seksi-seksi. Dewan Penyantun melingkupi Pelindung, yang dalam hal ini Kakandepag dan Rois Syuriah NU Kabupaten Kebumen; dan Penasehat, yang dalam hal ini ada 18 orang Kyai. Dewan Harian terdiri dari 3 orang Ketua, 3 orang Sekretaris dan 3 orang Bendahara. Adapun Seksi-seksi terdiri dari seksi Acara/ Protokol/ litbang, seksi Tahfidzul Qur’an, seksi Kamtib Arena, seksi Humas/ Publikasi, seksi Perlengkapan/ kotak amal/ penunggu sekretariat dan seksi Koordinator Kecamatan.

Posisi penting KH. M. Nashiruddin dalam kehidupan sosial keagamaan, jauh sebelum selaku Ketua Dewan Harian I majlis dzikir sudah dikenal sebagai da’i populer, Pengasuh PP al-Taqwa dan sekaligus mursyid kelompok *thariqoh Syadziliyah* yang memiliki ribuan anggota di seluruh Kebumen. Ayahnya mantan panglima AUI dan beliau aktif dalam organisasi NU semenjak masih menuntut ilmu di tingkat menengah (Hasan, 2009: 4-5). Beliau selaku wakil Bupati Kebumen, baru tahun 2000 dan selaku Bupati Kebumen baru menjelang akhir tahun 2009. Artinya pelaku peran sosial keagamaan lebih awal dan mendominasi dalam tindak lankah kehidupannya, bahkan lebih awal ketimbang posisi pejabat publik (kenegaraan).

Pelaksanaan mujahadah, sejak awal berdiri (sekitar tahun 1983-an) Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen dijadikan tempat kegiatan

yang sekaligus menjadi temu alumni santri PP Ploso, khususnya pendiri Majelis Dzikirul Ghofilin di Kebumen. Seiring perjalanan waktu, setelah tahun 1985 (2 tahun kemudian) pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi di satu tempat dipandang sudah cukup, dan untuk memberi kesempatan pada yang lain serta memperluas ikatan silaturahmi antar alumni santri Ploso, para pendiri akhirnya mengamalkan mujahadah secara bergilir, baik sebagai pelaksana maupun tempat dari PP/rumah alumni Ploso yang satu ke PP/rumah alumni yang lain.

Menurut beberapa kalangan, disinyalir bahwa jama'ah yang menghadiri mujahadah dzikir jauh lebih banyak secara kuantitas bila dibanding dengan masa setelah KH. M. Nashiruddin selaku wakil bupati, terlebih sekarang selaku bupati. Fakta banyaknya jumlah jama'ah mujahadah dzikir sebelum 2000-an, barangkali lebih disebabkan masih adanya kebersamaan para tokoh pendiri, yang diikuti oleh para jama'ah/ santri masing-masing tokoh pendiri tersebut. Tetapi bisa juga menurut Amirudin (jama'ah aktif), karena mujahadah waktu itu adalah kegiatan yang sama sekali baru di masyarakat Kebumen,<sup>3</sup> dan sekarang boleh jadi masyarakat mencoba menjaga jarak dengan elemen kekuasaan.

Prosesi pelaksanaan mujahadah menurut KH. Mudzakir, semenjak tahun 1996 mengalami penambahan kegiatan, yaitu diadakan sema'an Al Qur'an 30 juz, untuk kemudian dilanjutkan acara sambutan pengurus Majelis Dzikirul Ghofilin, pengajian dan dilanjutkan mengamalkan (*wirid*) Mujahadah Dzikirul Ghofilin yang dibaca bersama-sama dengan dipimpin seorang imam. Bahkan sebelum diadakan/ penambahan sema'an, beberapa kali pengurus majlis mempelajari (studi banding) ke setiap ada kegiatan sema'an di Yogyakarta, karena di Yogyakarta sema'an sangat meriah dan banyak sekali jama'ah yang berhadir.<sup>4</sup>

Perjalanan waktu dan perkembangan posisi sosial politik KH. M. Nashiruddin sebagai tokoh sentral juga telah membuat pelaksanaan Sema'an Al Qur'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin semakin populer dikalangan masyarakat Kebumen, bahkan terjadi pergantian dan penambahan kelompok peminat, tidak sebatas masyarakat umum, tetapi sekarang cenderung memasuki wilayah birokrasi; dan dukungan kepengurusannya (kordinator penggerak) sudah tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kebumen. Dan berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa peserta/ partisipan jama'ah ini setiap kegiatan berlangsung, bila di kawasan perkotaan bisa mencapai 3000 hingga 4000 orang, namun bila di kawasan pedesaan (pinggiran) bisa mencapai duakali lebih besar, hingga mencapai 8000 orang lebih.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Amirudin (Kepala Desa Kebunsari Petanahan & Jama'ah mujadah yang selalu menghadiri kegiatan Majelis Dzikirul Ghofilin), tanggal 6 Desember 2009

<sup>4</sup>Wawancara dengan KH Mudzakir (Ketua II Dewan Harian Majelis Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen), tanggal 1 Desember 2009



Gambar: Jama'ah Mujahadah Mujahadah Dzikrul Ghofilin (Doc: Pribadi)

Menurut banyak kalangan, besarnya jumlah jama'ah mujahadah di pedesaan tidak lepas dari masih terkonsentrasinya masyarakat Kabupaten Kebumen di daerah pedesaan dan struktur sosial-keagamaannya masih belum banyak tercemari oleh berbagai kepentingan. Hal lain yang memudahkan bagi masyarakat umum untuk mengikuti proses pengamalan mujahadah Dzikrul Ghofilin ini, adalah tanpa ada ketentuan *bai'at* (sumpah) sebagaimana halnya ketentuan *thoriqah*, bahkan menurut beberapa orang yang selalu mengikuti kegiatan ini, telah merasakan secara bathiniah dampak nyata dari pengamalan dzikir tersebut, terutama pikiran menjadi tenang, tenteram, damai walaupun dalam kehidupan masih tetap dicoba oleh Allah SWT, tetapi yakin akan diberi kesabaran dan diberi jalan keluar atas cobaan serta selalu tawakkal kepada Allah SWT, terlebih memanfaatkan hasil air *tabarru'* (air berkah).

#### B. Tahapan Permohonan Kegiatan Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin

Terbukanya kesempatan kepada masyarakat umum (berbagai kalangan), baik untuk mengikuti maupun berkeinginan melaksanakan aktivitas rutin Mujahadah Dzikrul Ghofilin, maka Majelis Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebupaten menetapkan waktu dan tanggal dilaksanakan, yaitu satu kali dalam jangka waktu selapanan (35 hari) tepatnya setiap malam Kamis Pon. Adapun tempat dilakukan secara bergiliran sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pengurus majelis Dzikrul Ghofilin Kabupaten.

Menurut Mulyadi (seksi Kamtib Arena), bahwa Cara/ mekanisme bagi masyarakat yang akan *ngondoh* (mohon menjadi tuan rumah) pelaksanaan Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan minimal 2 atau 3 bulan sebelumnya kepada pengurus majlis kabupaten, namun kebijakan pengurus lebih mengutamakan kepada masyarakat pemohon yang belum pernah melaksanakan, biasanya setiap

mujahadah akan dan sedang dilaksanakan, pemohon yang berkeinginan “menjadi tuan rumah” melaksanakan mujahadah selalu mencapai 2 hingga 3 orang/ tempat dan jarang sekali tidak ada pemohon (pernah tidak ada pemohon, namun ketika ditawarkan kepada masyarakat, selalu saja ada yang bersedia).

Sebelum diputuskan tempat pelaksanaan Sema'an dan Mujahadah, seksi Kamtib Arena selalu melakukan survei lapangan, terutama tempat-tempat para pemohon guna memastikan (penilaian) kelayakan tempat sema'an, tempat mujahadah guna menampung ribuan jama'ah, daya tampung tempat parkir dan lain sebagainya. Walau pada prinsipnya, Sema'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin dapat dilaksanakan di mana saja, di masjid, di perumahan, di tempat umum, alun-alun dan lapangan ataupun di mana saja (termasuk pekuburan-kata Gus Miek), tetapi yang lebih baik dan diutamakan berada di masjid.<sup>5</sup> Jelasnya, apabila berdasarkan survei diperhitungkan layak dilaksanakan pada tempat yang ditentukan pemohon, dan bila tempat yang direncanakan di masjid harus sudah ada pembicaraan kepastian dengan Kyai setempat dan ta'mir/ pengurus masjid, maka pada selesai acara mujahadah, langsung akan diumumkan kepada jama'ah yang hadir tentang tempat (ketempatan) akan dilaksanakan mujahadah malam Kamis pon mendatang (selapanan/ 35 hari berikutnya).

Berdasarkan adanya kepastian tempat, adat kebiasaan yang berlaku pada setiap malam Kamis wage (15 hari sebelum malam Kamis pon) beberapa pengurus majelis Dzikirul Ghofilin Kabupaten akan datang ke tempat, di mana rencana akan dilaksanakan mujahadah untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah secara bersama-sama dengan ta'mir/ pengurus masjid atau para pihak yang ketempatan. Musyawarah biasanya yang pertama kali dibicarakan adalah pentingnya pembentukan panitia pelaksana (ketua, sekretaris, seksi dan lain sebagainya) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk unsur sekolah terdekat bila dipandang perlu, guna memudahkan kordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya kepada pengurus majelis dzikir kabupaten, pihak keamanan (polsek), pihak kelurahan/ kepala desa hingga pihak kecamatan; dan dalam musyawarah sekalian dilakukan tanya-jawab tentang berbagai hal seputar sema'an dan mujahadah, termasuk hikmahnya.

Umumnya setelah terbentuknya panitia pelaksana, baru pengurus kabupaten membicarakan teknis pelaksanaan dari, persiapan penyediaan tarub “kira-kira” yang dibutuhkan, sound system, tikar untuk alas duduk para jama'ah, persoalan snack ringan dan minum (aqua gelas) untuk paling sedikit 2500 orang jama'ah yang hadir dan konsumsi untuk 10 hingga 13 orang para hafidz (penghapal) Al Qur'an ketika sema'an berlangsung dan untuk 25 hingga 40 orang tamu undangan khusus (kyai/ imam mujahadah) sebelum mujahadah dilakukan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Mulyadi (Pengurus Majelis Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen, seksi Kamtib Arena), tanggal 30 Nopember 2009..

hingga persoalan bungarampai,<sup>6</sup> santunan anak yatim dan bantuan/ subsidi dari pengurus kabupaten kepada panitia pelaksana.

Menurut Sudiyono, bahwa pelaksanaan sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin di Masjid Bani Ahmad sudah yang ketiga kali dan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, namun membutuhkan persiapan yang sangat matang, karena disamping membutuhkan banyak tenaga dan pikiran jama'ah masjid (termasuk pengurus muslimat), juga membutuhkan biaya yang cukup besar dan tenaga berbagai pihak, terutama pihak keamanan yang terdiri dari Hansip kelurahan/ desa dan aparat polsek, karena panitia pelaksana adalah penjamu tamu yang baik dari berbagai penjuru kota Kebumen dan sekitarnya, hal ini tidak sedikit, tapi ribuan jumlahnya. Artinya secara prinsip, bila akan melaksanakan sema'an dan mujahadah (*ngondoh*), koordinasi dengan kyai, pengurus kabupaten harus selalu dilakukan, bahkan dengan pihak kelurahan dan kepolisian, sehingga hal-hal yang tidak dikehendaki dapat terhindari sedini mungkin<sup>7</sup>. Hal senada juga diutarakan oleh Nyai H. Imam Sya'roni, bahwa pelaksanaan sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin di Pendopo Puring, bahkan biaya hingga mencapai empatjuta lebih.<sup>8</sup>

Sebagaimana umumnya ketika sema'an dan mujahadah dipahami sebagai ritualisasi dari agama dan akan mengaktualisasi dalam kehidupan para pemeluknya, maka seringkali keberagaman itu berada pada level masyarakat, yang pada akhirnya agama terintegrasi ke dalam sistem nilai sosial budaya, sistem sosial dan wujud kebudayaan fisik, yang kemudian bersinggungan melalui sebuah proses sosial dengan elemen-elemen sosial budaya lainnya, misalnya budaya "perlunya sukses dan meriah" dalam setiap kegiatan, sehingga promosi/ pengenalan karakter hingga akhirnya menyatukan simbol-simbol realitas sosial dengan stimulus emosional. Dalam konteks ini adalah adanya ketentuan paling lambat Selasa sore, pengurus majlis kabupaten sudah melakukan pemasangan ombol-ombol (bendera layur).

Hadirnya nuansa perlengkapan-perengkapan/ simbol realitas dan makna yang menjadi karakteristik dari sebuah kegiatan sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin di Kebumen, terutama di sekitar lokasi rencana akan dilaksanakan kegiatan, yaitu banyaknya terpasang di pinggir jalan-jalan protokol berupa ombol-ombol, berwarna-warni yang bertuliskan "DZIKRUL GHOFILIN" dan pada bagian bawah bertuliskan iklan salah satu rias penganten yang ada di Kebumen. Meski satu-satunya simbol, namun secara eksplisit telah memberi "makna" sebuah pemberitahuan bahwa akan diadakan sema'an dan mujahadah

---

<sup>6</sup>Segala sesuatu yang berhubungan bisyarah para hafidz sema'an, kyai/ imam mujahadah

<sup>7</sup>Wawancara dengan Sudiyono (selaku Ta'mir sekaligus ketua I panitia pelaksana mujahadah dzikir di Masjid Bani Ahmad Kolopaking Kebumen), tanggal 30 Nopember 2009.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Nyai H. Imam Sya'roni (PP Al Aqsho Puring dan selaku Muslimat NU), tanggal 3 Desember 2009.

dan sekaligus ajakan kepada seluruh masyarakat yang kebetulan melewati jalan tersebut untuk dapat berhadir mengikuti kegiatan, terlebih pada masyarakat sekitar. Hal ini bila dikembalikan pada salah satu cuplikan pidato Gus Miek “*Pramilo kolu crios dateng lare-lare, ngomongaken Dzikrul Ghofilin ojo pisan-plisan diiklan’ne, dipromosikne, minongko senjata katrol sukses*”.<sup>9</sup>

Fakta yang cukup menarik, berdasarkan informasi data Kamtib Arena, majlis sema’an dan mujahadah Dzikrul Ghofilin Kebumen untuk tiga bulan kedepan, yaitu malam Kamis Pon, bulan Pebruari 2010 sudah dipesan (*dingondoh*) oleh Kabag Mitra atasnama Kapolres Kebumen, dan akan dilaksanakan di halaman Mapolres Kebumen tepatnya sebelum memasuki masa kampanye dan pemilihan bupati Kebumen tanggal 11 April 2010, dengan tujuan utama mengajak masyarakat Kebumen untuk berdo’a bersama memohon keselamatan dan suasana Kabupaten Kebumen menjadi tenang dan damai, baik sebelum pemilihan maupun sesudah pemilihan.

### C. Prosesi Sema’an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin

Perspektif studi agama, nampaknya format aurad (*wiridan*) mujahadah menurut H. Bambang Sucipto tidak mutawatir (nilai mutawatir), karena tidak jelas dasarnya,<sup>10</sup> namun perspektif studi keagamaan, prosesi aktivitas Majelis sema’an Al Qur’an dan Dzikrul Ghofilin ‘Mantab’ Kebumen dipahami sebagai sebuah ritual keagamaan yang mengundang banyak kalangan elemen masyarakat.

Komitmen para pengurus majlis mujahadah, yang paling ketat menurut Mulyadi adalah pengurus harus bersih dari unsur partai politik, artinya bila seorang menjadi anggota kepengurusan suatu partai politik, maka harus memilih, menjadi pengurus partai atau tetap menjadi pengurus majlis dzikir. Begitu juga, guna menetralsir dari berbagai kepentingan (termasuk kepentingan politik *pengondoh* (pelaksana), maka peran pembawa acara semua prosesi ritual mujahadah langsung dipimpin oleh pengurus kabupaten, hal ini menurut para pengurus sejak 1996 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Amaliah Pra Mujahadah, yaitu pelaksanaan sebelum Dzikrul Ghofilin dimulai (malam kamis pon), ada beberapa amalan atau ritual yang dilakukan, diantaranya:
  - a. Sema’an Al Qur’an pada hari Rabu Pahing, yang dilakukan oleh beberapa orang hafidz (penghapal) Al Qur’an dan *disima’* (didengar-teliti) kanan-

---

<sup>9</sup>Artinya: Maka dari itu, Saya bercerita terhadap kawan-kawan dalam membicarakan Dzikrul Ghofilin jangan sekali-sekali diiklankan, dipromosikan untuk senjata meningkatkan kesuksesan.

<sup>10</sup>Wawancara dengan H. Bambang Sucipto (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen), 2 Desember 2009.

kiri oleh jama'ah/ melibatkan masyarakat sekitar, santri, sekolah dan lain sebagainya. Sema'an 30 juz Al Qur'an, dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pertama semenjak jam 06.00-07.00 pagi hingga jam 17.00 sore, pembacaan dari juz pertama hingga selesai juz ke duapuluh sembilan; dan tahap kedua sudah harus dimulai jam 20.00 malam (*ba'da isya awal*) guna penyelesaian juz ke tigapuluh (*khataman*) sambil menunggu berkumpulnya para jama'ah yang akan mengikuti prosesi mujahadah, dan diakhiri dengan do'a-do'a;

- b. Selesainya prosesi khataman dan sebelum memasuki (memulai) amalan Mujahadah Dzikirul Ghofilin terlebih dahulu para jama'ah dituntut membacakan Surat al-Fatihah yang diberikan (diniat-hadiahkan) kepada para ulama/masayyih, sesepuh masyarakat/ tokoh-tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia, khususnya hadiah kepada tokoh ulama tempat pelaksanaan Mujahadah Dzikirul Ghofilin.
- c. Sambutan pengurus Majelis Dzikirul Ghofilin Kabupaten Kebumen, dalam hal ini biasanya langsung dibawakan oleh Ketua I Dewan Harian Majelis Dzikirul Ghofilin KH. M. Nashiruddin AM untuk memberi pengarahan tentang santunan anak yatim, ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana dan seluruh perangkatnya, dan ucapan selamat datang kepada seluruh para hadirin jama'ah Mujahadah Dzikirul Ghofilin; Hal ini merupakan satu-satunya sambutan.
- d. Santunan anak yatim yang dananya sudah dialokasikan diserahkan sepenuhnya kepada panitia pelaksana untuk mendistribusikannya, hal ini dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial dari Majelis Dzikirul Ghofilin dan santunan tersebut diharapkan dapat memberi motivasi kepada para jama'ah dzikir dalam kehidupannya untuk selalu ingat kepada Allah dan hamba-hambanya yang lain;
- e. Muqodimah/ Pengajian sebagai kata penyejuk bagi jama'ah Mujahadah Dzikirul Ghofilin, sekaligus sebagai *tauziyah* (nasehat) atau *tazkirah* (memberi pemahaman) kepada para jama'ah tentang berbagai hal mujahadah Dzikirul Ghofilin, baik esensi maupun hikmahnya, hal ini biasanya disampaikan oleh KH. Mundzir Nadzir dari Kaliangkrek Kajuran Magelang Jawa Tengah;

Setelah selesai semua rangkaian prosesi pramujahadah, maka memasuki rangkaian inti pelaksanaan Mujahadah Dzikirul Ghofilin. Mujahadah tersebut dipimpin oleh seorang imam, sedangkan para jama'ah mengikuti bacaan hal apa yang dibacakan oleh imam hingga selesai.



Gambar: KH. M. Nashiruddin & Para Kyai (Doc: Pribadi)

2. Amaliah Mujahadah Dzikirul Ghofilin, yaitu prosesi zikir (Mujahadah Dzikirul Ghofilin) yang diamalkan/ dibaca secara bersama-sama, yang dipimpin oleh seorang imam, dalam hal ini KH. Agus Baqu Arifin dari Kajuran Magelang Jawa Tengah atau sesekali waktu dipimpin oleh KH. Agus Sabuth Panoto Projo (putra Gus Miek) Ploso Mojo Kediri Jawa Timur. Dalam mengamalkan mujahadah Dzikirul Ghofilin, ada hal yang tidak boleh kurang dari ketentuannya dan juga tidak boleh lebih, sehingga apabila itu terjadi, maka dzikir tersebut belum dikatakan sempurna. Adapun amalan-amalan/ wirid dzikir yang dibaca saat Mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah:
  - a. Tawassul dengan membaca Surat al Fatihah sebanyak 100 X dan tawassul kepada Allah SWT serta tawassul kepada para tokoh muslim sedunia;
  - b. Membaca Ayat Kursi 1X
  - c. Membaca Asma'ul Husna 1X
  - d. Membaca Shalawat Muqorrobun 1X
  - e. Membaca Istigfar 100 X
  - f. Membaca Shalawat Nabi 300 X
  - g. Membaca Dzikir 100 X ditambah Shalawat Burda
  - h. Membaca Do'a Penutup
  - i. Membaca Do'a Syair.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat, terlebih kalangan pedagang, politisi dan birokrasi disamping masyarakat umum, maka pengurus majlis menetapkan bahwa pelaksanaan mujahadah dzikir (ritual inti) sudah harus selesai paling lambat jam 12.00 malam, karena pagi sudah harus bekerja sebagaimana biasanya. Hal ini menjadi pijakan bagi pembawa acara untuk selalu disiplin (tepat waktu) memulai dan mengakhiri prosesi ritual.

#### D. Substansi Sema'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin

Gelombang globalisasi telah menghadirkan perbedaan-perbedaan yang meruntuhkan totalitas, kesatuan nilai dan kepercayaan. Globalisasi yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam kehidupan telah mendorong pembentukan definisi baru tentang berbagai hal dan memunculkan praktik kehidupan yang beragam. Berbagai dimensi kehidupan mengalami redefinisi dan diferensiasi terjadi secara meluas yang menunjukkan sifat relatif suatu praktik sosial (Abdullah, 2009: 107). Globalisasi dapat mengandung unsur negatif, salah satu dampak negatif dari proses globalisasi antara lain ialah hilangnya tradisi, hal ini dikhawatirkan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat secara bertahap menghilang. Penyebab utama, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan selektif dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan global mudah dipengaruhi, sehingga tradisi terancam punah. Lebih jauh, hilangnya nilai-nilai tradisi sebagai pengikat kehidupan bersama mulai melonggar, sehingga terjadi banyak penyimpangan sosial yang merongrong disiplin hidup bermasyarakat (Tilaar, 2002: 65-66).

Guna mengantisipasi gelombang besar globalisasi, sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kebumen telah dipahami secara substansial dan diyakini sebagai media jalan keluarnya, karena eksistensinya adalah salah satu ibadah tambahan sekaligus jalan (*wasilah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang oleh KH. Nawawi (Adikarso Kebumen) majlis mengikuti cara amaliah *wiridan* yang sudah kumpulkan dan diajarkan Gus Miek dengan ketentuan bila Sema'an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin dilakukan secara bersama-sama, maka dipimpin seorang imam yang baik (siapa saja "boleh asal bukan pezina), namun dapat juga dilakukan secara sendirian, karena salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan mendekatkan diri kepada Allah SWT secara ikhlas. Pada prinsipnya, tidak ada bai'at dan hanya dibebani beberapa persyaratan, yaitu:

1. Melaksanakan hal-hal yang diwajibkan Allah, seperti Sholat, Puasa, Zakat dan Haji (bagi yang mampu).
2. Pengamalan Mujahadah Dzikirul Ghofilin harus diniati ibadah untuk mencari ridlho Allah SWT dan bukan niat selainnya.
3. Saling menghormati (ramah-tamah) kepada sesama dan tidak merasa lebih suci, tidak sombong dengan mengatakan bahwa Mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah yang paling benar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan K.H. Nawawi (Ketua III Dewan Harian Majelis Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen), 30 Nopember 2009.

Sisi lain, menurut pengurus majlis bahwa pelaksanaan sema'an dan mujahadah di Kebumen bisa bermakna proses pendidikan Islam dan dakwah (*syi'ar*) pembangunan masyarakat. Artinya peran utama Majelis Dzikirul Ghofilin pada tatanan masyarakat, KH. Nashiruddin selaku tokoh sentral dan selaku Bupati Kebumen telah berupaya membangun sebuah konsepsi dasar 'pembangunan manusia Indonesia seutuhnya', yaitu pengembangan masyarakat yang selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan serta meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dalam pembangunan (*insan kamil*).

Substansi amaliah wiridan mujahadah dzikir, sebagaimana bahasan sebelumnya, tercermin pada beberapa cuplikan pidato Gus Miek berikut:

1. *Ulama' sesepuh-sesepuh shing do fatichahi kaleh tiyang-tiyang sing tertera tercantum dalam Dzikirul Ghofilin niku badhe panjenengan derek'i fil akhirah.*<sup>12</sup>
2. *Hadirin, kolowau wonten ingkang tanglet, Gus Miek, Samii' Qur'an niki manawi ba de sholat fardhu aqibah kulli maktubatin, sing sae maos nopo?" Damel wiritan!! Kejjawi panjenengan ingkang sampun nderek Ba'dhit Thoriqoh Al-Muktabarah, sae nglanggengaken Fathihah kaping satus (100), Meniko ugi dados simbolipun Dzikirul Ghofilin. Resesinipun nderek As Syaikhul Imam Abi Hamid Muhammad kaliyan rayinipun Syaikh Ahmad Al Ghozali.*<sup>13</sup>
3. *Jadi ini sebuah pembangunan yang harus diwujudkan oleh penderek, pimpinan Dzikirul Ghofilin ataupun Sema'an Al Qur'an kalian Dzikirul Ghofilin, ingkang sampun dipun simboli kalian Fatichah mi'ata marroh ba'da kulli sholat, meniko berkaitan manunggal.*<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa cuplikan pidato di atas, semakin jelas bahwa mujahadah Dzikirul Ghofilin penekanannya pada amaliah yang berupa pembiasaan wiridan "membaca Surat Al Fatihah dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya" yang sudah ditentukan jumlah bilangannya. Dalam pengamalannya

---

<sup>12</sup>Artinya: Ulama sesepuh-sesepuh semua, yang dikasih kiriman Surat Al Fatihah, yang tercantum dalam –amalan-- Dzikirul Ghofilin, itulah yang akan kita ikuti sampai akhirat/ akan bertemu diakhirat kelak (1998)

<sup>13</sup>Artinya: Hadirin, tadi ada yang nanya, "Gus Miek, orang Dzikirul Ghofilin kalau setiap selesai sholat fardhu, yang bagus membiasakan membaca amalan apa?", buat wiritan !!, kecuali bagi kalian yang sudah mengikuti salah satu Thariqah yang sudah diakui, bagusnya mengamalkan membaca Surat Al Fatihah 100 kali dan itu menjadi simbolnya (ritualnya) Dzikirul Ghofilin. Hal ini mengikuti As-Syaikhul Imam Abi Hamid Muhammad dan adiknya Syaikh Ahmad Al Ghozali (1988).

<sup>14</sup>Artinya: Jadi sebuah pembangunan yang harus diwujudkan oleh pengikut, pimpinan Dzikirul Ghofilin atau Sema'an Al Qur'an, sebab antara sema'an Al Qur'an dan Dzikirul Ghofilin yang sudah disimboli dengan Surat Al Fatihah 100 kali setiap selesai Shalat, itu berkaitan satu dan lainnya (1988).

menurut pengurus majlis kabupaten “sudah tidak memerlukan ijazah”, karena sudah diijazahkan secara ‘*ammah* (umum), hal ini dapat mempermudah bagi yang berminat untuk mengamalkan, baik sendiri-sendiri maupun secara berjama’ah seperti mujahadah. Khususnya bagi pengamal wiridan membaca Surat Al Fatihah 100 X dilakukan dengan pilihan tahapan, misalnya setelah sholat shubuh 30x, setelah dhuhur 25x, setelah ‘ashar 20x, setelah magrib 15x dan setelah isya’ 10x; atau setelah sholat shubuh 21x, setelah dhuhur 22x, setelah ‘ashar 13x, setelah magrib 24x dan setelah isya’ 10x; namun yang lebih baik dan umumnya dilakukan adalah langsung 100 kali tiap hari.

Aktivitas kepengurusan majlis sema’an dan mujahadah, yang memiliki kecenderungan selalu memobilisasi massa (masyarakat) dalam prosesnya yang penuh dengan idiom, simbol dan logika keagamaan, ternyata “dipandang” sangat efektif untuk terjadinya even bagi kepentingan agama itu sendiri untuk semakin memperjelas posisi proses pendidikan para jama’ah,<sup>15</sup> terutama pendidikan pada potensi kemanusiaan (kemampuan dan kapasitas), terlebih para jama’ah umumnya dari pedesaan masih sangat paternalistik, hal ini adalah kewajiban dakwah muslim, terlebih oleh pemimpin masyarakat terhadap sesama manusia dan ini sebagai kebutuhan dasar manusia dalam mengaktualisasi *spiritualitas* dan pembangunan kehidupannya.

Nampaknya para jama’ah sangat mudah dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan untuk kemudian supaya disempurnakan oleh kebiasaan yang baik, oleh alat/media yang disusun sedemikian rupa dan dikelola oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan (Zuhairini, 2008: 150). Apabila pendidikan melalui wiridan mujahadah dipandang sebagai suatu wasilah menuju proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan terarah, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya pada suatu tujuan, karena tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap proses tersebut. Disamping itu, tujuan pendidikan tersebut sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan proses pendidikan masyarakat. Ia merupakan gambaran tentang perilaku yang diharapkan akan tercapai oleh jama’ah setelah mengikuti proses tersebut.

Konsepsi Pendidikan masyarakat dalam Islam berbeda dengan pendidikan pendidikan moral lainnya, karena pendidikan dalam Islam lebih menitik beratkan pada hari esok, yaitu hari kiamat beserta beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perhitungan amal, pahala, dan dosa. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa

---

<sup>15</sup>Pendidikan adalah sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Pendidikan merupakan pola perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual, dan jasmani (fisik), oleh dan untuk kepribadian individunya, dan kegunaan masyarakatnya yang diharapkan dengan menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya (tujuan terakhir).

pendidikan dalam masyarakat Islam selalu menyangginkan dan menyeimbangkan antara dua sisi kehidupan, yaitu kebaikan mendunia dan mengakhirat.

Pemahaman diatas sejalan dengan tujuan agama sebagai salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan ikhlas dalam beribadah serta tidak berprasangka buruk terhadap sesuatu yang mereka alami walau tidak sesuai dengan yang diinginkan, berbagai ujian dan cobaan harus diyakini sebagai upaya untuk mamperbaiki segala kekurangan yang ada dalam diri manusia serta harus selalu bertawakal/ berserah diri setelah melakukan usaha (*ikhtiyar*) dan do'a. Artinya sema'an dan mujahadah (do'a-doa) yang menjadi rangkaian wiridan Mujahadah Dzikrul Ghofilin pada dasarnya merupakan media (*wasilah*) pendidikan Islam dan dakwah kearah transformasi sosial keagamaan hingga terbangun kehidupan individu dan masyarakat Islami, dalam kontek ini dakwah merupakan upaya untuk melakukan perubahan kearah perbaikan umat, masyarakat dan negara serta memastikan nilai-nilai Islami menjadi warna dalam kehidupan sosial, Kabupaten Kebumen khususnya.

## BAB IV

### FAKTOR YANG MENDORONG KETERLIBATAN PARA PELAKU POLITIK (PARTISIPAN) DALAM AKTIVITAS MAJLIS DZIKRUL GHOFILIN

#### A. Dasar/ Prinsip yang diyakini

Masyarakat Kabupaten Kebumen yang umumnya beragama Islam, tentu sangat akrab dengan ajaran-ajaran Islam dari para Kyai setiap menyampaikan ceramah di masyarakat, terutama ketentuan strata *syari'at*, *thariqat*, *hakikat* dan *ma'rifat* guna memperdalam spritualitas. Memang umumnya para Kyai selalu menyampaikan wacana tersebut karena kemaslahatannya dan dianggap penting, khususnya memudahkan secara terpisah antara strata yang satu dengan strata lainnya dalam menggapai tujuan pengenalan kepada Allah SWT, walau keempat strata dimaksud adalah satu kesatuan (*four in one*) yang tidak bisa dipisahkan.

Budayawan Emha Ainun Najib mengilustrasikan sebagaimana dikutip oleh Susetya, *syari'at* seperti badan yang bisa bergerak, melangkah, dan seterusnya; sedangkan *thariqat*-nya adalah cara manusia bergerak, cara seseorang memasak, cara seorang guru mengajar, dan sebagainya. Menurut istilah Emha, *thariqat* itu semacam *kaifiyah*, dan itulah *thariq* adalah jalan, dengan atau tanpa tanda petik, denotatif atau konotatif. Sementara, *syari'at* itu sebenarnya juga jalan, tetapi *thariq* lebih bersifat kualitatif, sedang *syari'at* bersifat kuantitatif. Sementara *hakikat* ibaratnya seperti kemana tujuan seseorang berjalan, titik tujuannya atau apa yang akan dituju, atau apa yang ingin dicapai, sedangkan *makrifat* adalah seseorang yang telah mengetahui sesuatu, meski sebelumnya ia tidak atau belum mengetahui.

Masyarakat Islam tidak bisa hanya 'memilih' strata mana yang disenangi sesuai dengan kecenderungan hatinya, sebab dalam Agama Islam terdapat tiga esensi, substansi, inti ajarannya, yaitu Islam, Iman dan Ihsan.

1. Islam, sebagaimana diketahui Islam terdiri atas lima rukun, yakni Syahadah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji;
2. Rukun Iman terdiri atas enam rukun, yakni Iman kepada Allah SWT, Malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Hari Kiyamat dan Takdir (ketetapan Allah); dan
3. Ihsan, yakni substansinya untuk *bertaqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW (Susetya, 2008: 36-38)

Bagi kebanyakan orang, keberhasilan Majelis Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kebumen dalam setiap aktivitasnya, telah menjadi peluang menarik sekaligus magnet bagi pelaku politik praktis (parpol) dan pejabat publik daerah (birokrasi-karir), hal ini 'dipandang' cukup efektif untuk terjadinya even pertukaran (tawar-menawar) kepentingan, bahkan even bagi agama itu sendiri untuk semakin memperjelas posisi bersinggungan dengan aspek-aspek kehidupan secara umum.

Nampaknya bagi komponen masyarakat muslim Kebumen umumnya, keyakinan terhadap ajaran Kyai tentang strata *syari'at*, *thariqat*, *hakikat* dan *ma'rifat* guna memperdalam aspek *spritualitas*, sebagaimana seringkali disampaikan oleh KH. Mundzir Nadzir dari Kaliangkrek Kajuran Magelang ketika *tauziyah* (nasehat) atau *tazkirah* (memberi pemahaman) kepada para jama'ah tentang berbagai hal mujahadah Dzikrul Ghofilin, baik essensi maupun hikmahnya. Terlebih keyakinan pada hal-hal ajaran agama (amalan dzikir) yang disampaikan oleh Gus Miek, kata pengurus majlis "menjadi pijakan dasar" yang mendominasi keyakinan untuk menghadiri setiap aktivitas sema'an dan atau dzikir.

Mengamalkan (membiasakan wirid) ritual dan do'a-do'a yang ditentukan secara khusus, hal yang diharapkan KH. Hamim Jazuli (Gus Miek) kepada para hadirin dan pengamal sema'an dan mujahadah adalah tercermin pada pidatonya:

*"Kulo panjenengan, anggota Samiin, Dzikrul Ghofilin khususipun, ayo podo ramah tamah, apik lahir bathin karu liyan, karo sesomo. Podo-podo menungso, senajan seje wiritan, seje aliran. Kulo panjenengan kedah ndukung kiwo tengen sing pun kadung mantep Fin Naqsabandiyah, Fil Qodariyah au Fi Asatidz Thoriqoh muktabarah. Sampun ngatos terpancing mboten nguramati dateng salah satunggale aliran wirit ingkang tegas muktabar dengan pakem-pakem ingkang sampun mu'aya, khasshoh, lan tegas".<sup>1</sup>*

## B. Pola Keterlibatan Partisipan

Mencermati fenomena kegiatan ritual mujahadah Dzikrul Ghofilin yang dilaksanakan di Masjid Bani Ahmad Kolopaking (kawasan perkotaan) dan kegiatan di Pendopo Kecamatan Puring kebumen (kawasan pedesaan pesisir), sekedar menyebut beberapa contoh: ditemukan beberapa perbedaan, misalnya

---

<sup>1</sup>Artinya: Saya, kalian anggota Sema'an, Dzikrul Ghofilin khususnya, ayu beramah tamah, baik lahir-bathin satu sama lainnya, sama sesama, sama-sama manusia walaupun beda wiritan, beda aliran. Saya, kalian harus mendukung kanan-kiri yang sudah terlanjur mantep mengikuti *Thoriqah Naqsabandiyah*, *Qodariyah*, atau *Thariqah muktabarah* lainnya. Jangan sampai terpancing (tidak pernah wiridan), bukan dengan menghormati dengan salah satunya aliran wirit yang tegas muktabar dengan pedoman yang sudah jelas ketentuannya (1990).

aspek tipologi upaya pendanaan dan komposisi aktor partisipan (yang terlibat). Kegiatan mujahadah dzikir di Masjid Bani Ahmad Kolopaking (masjid pasar Kebumen) dilaksanakan oleh panitia pelaksana murni dari ta'mir/ pengurus masjid, dengan pembiayaan dari sumbangan jama'ah masjid dan kas ta'mir serta sumbangan berupa snack dan air putih gelas dari jama'ah khususnya sekitar masjid, dengan ketentuan tiap keluarga supaya menyediakan minimal 25 bungkus snack.

Jama'ah yang hadir ketika berlangsung kegiatan dzikir diperkirakan tidak lebih dari 3000 jama'ah dengan komposisi aktor yang terlibat, mayoritas dari pedagang pasar dan masyarakat petani pedesaan dari berbagai penjurur Kabupaten Kebumen sekitarnya dan sebagian dari mereka datang sambil membawa bungkusan yang berisi air putih dalam botol yang dibuka tutupnya untuk kemudian diletakkan dihadapan masing-masing jama'ah, dan lebih baik di depan (hadapan) para Kyai dan jama'ah. Dan para pelaku politik praktis (parpol) dan pejabat publik daerah (birokrat-karir) yang rasional, sangat sedikit yang hadir, kalaupun ada tidak lebih dari 3-5 orang.



Gambar: Kegiatan Mujahadah Dzikirul Ghofilin (Doc: Pribadi)

Berbeda halnya dengan kegiatan di Pendopo Kecamatan Puring yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana secara bersama-sama antara tokoh masyarakat, pihak unsur birokrasi kecamatan dan desa, sehingga pembiayaan total dari keseluruhan dibagi (ditanggung) atas beberapa desa dan barangkali dapat diambilkan dari kas desa. Adapun snack dan air putih gelas dari pengurus muslimat di tiap desa ditentukan minimal supaya menyediakan 200 bungkus, meski dalam realisasinya ada yang menyediakan hingga mencapai 400 bungkus.

Jama'ah yang hadir diluar dugaan panitia, karena semula diperkirakan hanya sekitar 5000 jama'ah, mengingat musim hujan juga kondisi masa tanam, dan ternyata mencapai 8000 jama'ah lebih dengan komposisi aktor yang terlibat bervariasi, meski mayoritas berasal masyarakat pedesaan dari Kecamatan Puring sendiri dan sekitarnya Kecamatan Petanahan, Gombang dan berbagai penjurur desa Kabupaten dan lain sebagainya, namun dari kalangan politisi partai

dan pejabat publik nampak bertaburan seperti bintang di langit, tebar pesona bahkan disertai dengan sumbangan keuangan kepada majlis dzikir dan panitia pelaksana. Tentang realitas perilaku jama'ah irrarsional, yaitu sebagian dari mereka yang datang sambil membawa bungkusan berisi air putih dalam botol, dan diberi ciri (tanda) masing-masing, untuk kemudian dibuka tutupnya dan diletakkan di hadapan para Kyai (imam mujahadah) dan jama'ah, menurut Nyai H. Imam Sya'roni adalah hal biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap paling baik, sehingga ketika selesai mujahadah air tersebut diambil kembali oleh pemiliknya masing-masing dan diyakini sudah menjadi air *tabarru'* (air berkah) nantinya untuk dipergunakan sesuai niatnya.

Secara kuantitatif, perbedaan tipologi dan tempat ternyata cukup mempengaruhi sukses dan semaraknya sebuah kegiatan. Keterlibatan (campurtangan secara sengaja atau tidak) para pejabat publik daerah (birokrat) yang umumnya memiliki sikap rasionalitas, dalam setiap kegiatan mujahadah dzikir dengan tetap memakai atribut kewenangan dan simbol jabatan dapat saja diklaim lebih bersifat "fasilitator", sehingga kegiatan dapat lebih efektif dan efisien, karena birokrasi memiliki semua hal yang dibutuhkan, termasuk pendanaan. Namun bila ditinjau dari aspek peran dan fungsinya sebagai abdi negara yang harus netral, tentu bukan wilayah kewenangannya. Agak berbeda dengan H. Makhrur AM, bahwa khusus keterlibatan para birokrasi pada kegiatan keagamaan dengan harapan terjadi pembiasaan berfikir agamis, mengerti masalah-masalah keislaman, mau berinfaq, bersedekah dan lain sebagainya, hal ini sesuai dengan kultur Kebumen Beriman, lebih jauh ini dalam arti islamisasi pemikiran birokrasi.<sup>2</sup>

Pola (*pattern*) keterlibatan para partisipan, selain masyarakat umum yang sangat bervariasi, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara politisi dan birokrasi, yaitu dengan datang lebih awal memakai mobil plat merah bagi yang kebetulan ada mobil dinas, meski hanya beberapa yang lebih memilih naik motor atau mobil pribadi dan mengikuti setiap aktivitas mujahadah dzikir secara khusus. Perbedaan yang cukup menarik antara partisipan politisi dan birokrasi hanya pada pola penampilan kharismatik dengan menonjolkan 'tebar pesona' pada konstetuenya dan memanfaatkan ritual kirim (*tawassul*) Surat Al Fatihah kepada siapa yang diniatkan dengan media infaq dan sedekah (menulis namanya pada amplopnya) kepada majlis dzikir, dan terkadang kepada panitia pelaksana.

Makhrur AM sangat memahami gejala banyaknya kalangan, terutama aktor partai politik yang tertarik mengikuti mujahadah dzikir, sebagai gerakan mobilisasi umat beragama lebih dikarenakan aspek-aspek tertentu guna memenuhi kepentingannya, namun umumnya sangat "musiman" atau sangat

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan H. Makhrur Adam Maulana (Mantan Wakil Ketua DPRD 2004-2009 dan Ketua Tanfidziyah DPC PKB Kebumen), tanggal 2 Desember 2009.

tergantung pada situasi dan kondisi, sehingga pola keterlibatan guna mencari dukungan dan legitimasi dari para tokoh agama dan masyarakat pemilih (konstituen) adalah persoalan wajar, terlebih mendekati suasana pemilu legislatif namun juga tidak/ jangan dipolitisasi.

Pandangan politisi terhadap kecenderungan mobilisasi umat beragama itu mungkin wajar dalam proses mengajak kebaikan di manapun, lebih-lebih proses politik dalam masyarakat di daerah yang masih tergolong paternalistik dan relatif kuat dalam pemelukan dan pemaknaan agama. Tetapi, pencampuradukkan kepentingan politik yang demikian menjadi satu agenda sekaligus dapat memunculkan dilema dalam makna serta fungsi keberagamaan di kalangan umat beragama itu sendiri. Alasan yang sangat mendasar dari kalangan pelaku politik yang menjadi patisipan kegiatan mujahadah dzikir, umumnya beralasan semata-mata mendekati diri kepada Allah sekaligus pada konstituen Islam, persoalan ada yang terlalu berlebihan (*oper acting*), itu lebih dikarenakan karakteristik orang per-orang.

Namun secara kualitatif, sisi lain kehadiran masyarakat pedesaan yang umumnya sangat irrasional bahkan paternalistik, karena mereka sangat hormat dan patuh pada pimpinan, terlebih pada pemahaman mereka bahwa “Dzikrul Ghofilin adalah identik dengan KH. Nashiruddin” yang sangat mereka agungkan. Hal ini memperkuat upaya pengurus majlis dalam memasuki *trend santrinisasi* (islamisasi) para partisipan atau pengamal *wiridan mujahadah dzikir*, yang sama-sama memiliki harapan, yaitu sesuai dengan namanya majlis mujahadah (majlis panyowonan) “Dzikrul Ghofilin” adalah ‘*dzikir wong-wong lale*’, yaitu dzikir untuk selalu mengingat Allah, artinya dengan berzikir kita selalu ingat dengan Allah dan tidak menjadi orang yang lupa (mengingatkan orang-orang yang lupa untuk kemudian meminta kebaikan dunia dan akhirat). ‘Mantab’, yang dalam bahasa arab bermakna ‘orang-orang yang bertaubat’. Terlepas dari ada atau tidak sebuah peluang momentum mencari dukungan dan legitimasi dari para tokoh agama dan politik umumnya.

Harapan lebih jauh, barangkali sejalan dengan harapan yang terjadi pada jama’ah-jama’ah dzikir di beberapa tempat lainnya (di luar Kebumen), yang ketika Gus Miek masih hidup berpidato sebagai berikut:

*1. Demi Allah, manah kolo namung dateng Allah mugo-mugo Samiin Setia, Pengamal Dzikrul Ghofilin niki kabeh mas’alah-mas’alaha tuntas diganteni karo Allah.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Artinya: Demi Allah, hati saya Cuma bisa menangis kepada Allah, mudah-mudahan para pendengar setia (Al Qur’an), pengamal Dzikrul Ghofilin ini semua masalah-masalah tuntas diganti/ ditolong oleh Allah (1991)

2. *“Gus Miek, kolu dateng kampung niku sareng-sareng tiyangkatah?”, Sing penting imut datang Allah, mboten rumaos langkung suci ketimbang liyane, ora sempat nglirik maksiate wong liyo, kaleh sinten-sinten nggaduh manah sing sae. Nggih niku ciri khase pengamal Dzikrul Ghofilin.*<sup>4</sup>
3. *Lha mugi-mugi termasuk Dzikrul Ghofilin sing sampun dados ketahanan bathiniyah, mangke dados penyangga kulo penjenengan wonten ing sidang-sidang yaumul chisab. Niku. Niku sing penting. Ditengah-tengah kulo panjenengan angel noto bojo, noto rumah tangga, sulitnya menciptakan sesuatu yang indah, tanda-tanda musibah badhe dumugi, katah, berarti, kulo panjenengan dituntut nyusun ketahanan bathiniyah, nyentuh dospundi supados Allah niku sayang, gati teng kulo panjenengan. Niki mawon.*<sup>5</sup>

Mendasarkan pada beberapa pidato Gus Miek di atas dan mengingat eksistensi mujahadah sebagai salah satu ibadah tambahan sekaligus jalan (*wasilah*) untuk mendekati diri kepada Allah SWT, maka adalah wajar bila para jama'ah yang datang (dari berbagai kalangan) memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan motivasi kepentingan yang melatarinya, misalnya motivasi agama (silaturrahi dan sekaligus mendekati diri kepada Allah), motivasi politik atau kekuasaan/jabatan, yang pada akhirnya bermuara pada motivasi ekonomi. Namun secara umum bila mendasarkan hasil observasi dan wawancara pada beberapa kalangan, ditemukan penjelasan secara eksplisit bahwa kedatangan (alasan kehadiran) mereka semata-mata “ingin berdo'a” secara bersama-sama masyarakat, untuk kebaikan bersama.

### C. Motivasi Kepentingan individual dan kelompok

Konsepsi dasar adalah ketika agama, dalam arti ritual keagamaan mengaktualisasikan dalam kehidupan para pemeluknya, maka keberagamaan itu berada pada level masyarakat, sehingga agama kemudian terintegrasi ke dalam

---

<sup>4</sup>Artinya: Gus Miek, saya datang dari kampung itu bersama-sama orang banyak?, selalu berjama'ah, yang penting ingat dengan Allah, tidak merasa lebih suci daripada yang lainnya, tidak sempat melirik maksiatnya orang lain, sama siapa saja mempunyai hati yang baik, yaitu ciri khusus orang pengamal Dzikrul Ghofilin (1988)

<sup>5</sup>Ya mudah-mudahan termasuk Dzikrul Ghofilin yang sudah menjadi ketahanan batiniyah, nanti menjadi penyangga. Saya dan kalian ketika ada di sadang-sidang Hari Penghitungan. Itu yang penting, ditengah-tengah Saya dan Kalian ketika susah menata isteri, menata rumah tangga, sulitnya menciptakan sesuatu yang indah, tanda-tanda musibah yang bekal datang, banyak, berarti Saya dan Kalian dituntut menyusun ketahanan batiniyah dan nyentuh bagaimana supaya Allah itu sayang, memperhatikan terhadap Saya dan Kamu sekalian. Ini saja (1991).

sistem nilai sosial budaya, sistem sosial dan wujud kebudayaan fisik yang kemudian bersentuhan melalui proses sosial dengan elemen-elemen sosial budaya lainnya. Secara sosiologis, agama dalam realitas kehidupan pemeluknya pasti akan bersentuhan dengan pemenuhan berbagai kepentingan kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat fisik-biologis, sosial, ekonomi dan politik, maupu kebutuhan integratif yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan manusia seperti kebutuhan untuk bermoral, beradab, dan lain sebagainya yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Artinya agama dan keberagaman masyarakat menjadi saling kait-mengait antara dimensi normatif faham dan keyakinan dengan dimensi kehidupan aktual baik pada level individual maupun kolektif dalam dinamika kehidupan masyarakat (Nashir, 1999: 108-109).

Aktivitas sema'an dan mujahadah sejak awal sudah disadari merupakan aktivitas yang membutuhkan biaya yang cukup besar, pikiran bahkan tenaga, sehingga bagi panitia pelaksana (*pengondoh*) dan pengurus majlis kabupaten selalu berupaya meringankan segala hal yang menjadi bungarampai suatu kegiatan ritual, dengan mencoba menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, terutama pihak yang memiliki berbagai pasilitas, dalam hal ini wilayah birokrasi dari berbagai tingkatan. Misalnya birokrasi desa, kecamatan setempat dan birokrasi tingkat daerah, tentu saja dalam rangka saling memenuhi harapan-harapan yang ditargetkan.

Mencermati segala persiapan dan prosesi kegiatan sema'an dan mujahadah dzikir yang dilaksanakan secara *khusu'* dan sangat substansial pada upaya pendekatan kepada Allah SWT, dapat dipastikan bahwa masyarakat sejatinya memiliki *motivasi internal* dalam mengelola kepentingan yang dipandang sebagai dorongan mental, paling tidak dalam menggunakan dan mengarahkan perilaku kemanusiaannya, termasuk perilaku belajar agama. Artinya dalam motivasi internal mengikuti tahapan kegiatan terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku belajar memahami agama secara mendalam. Hal ini secara bersamaan dan tanpa disadari memenuhi *motivasi eksternal*, dalam hal ini pengurus majlis dzikir dan panitia pelaksana sebagai upaya rekayasa kepentingan agama dan pelaku politik sebagai upaya meneguhkan kepentingan-kepentingan politiknya.

Memahami fenomena yang ada, secara deskriptif analitis, maka dapat dijelaskan bahwa motivasi kepentingan kelompok tertentu secara terstruktur terhadap kegiatan majlis dzikir menjadi sangat sumir (kabur), namun bukan berarti tidak ada karena kepentingan kelompok sudah dipecah menjadi bagian-bagian individu dengan beban tugas masing-masing. Kuatnya motivasi kepentingan individu beragama, yaitu motivasi agama yang dikembangkan

melalui beberapa ajaran yang disampaikan para Kyai/ imam (tokoh sentral) dalam memberikan motivasi kepada masyarakat binaannya, misalnya sema'an Al Qur'an adalah sebuah kebaikan yang tinggi, bertawassul melalui Surat Al Fatihah kepada Allah SWT dan tawassul kepada para tokoh muslim sedunia; membaca salawat untuk memperoleh syafa'at dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak, dan do'a-do'a (sya'ir) lainnya ada sebuah harapan "pahala" dari Allah SWT, termasuk apa yang diniatkan akan dikabulkan, hal ini adalah kebaikan yang mendunia dan mengakhirat.

Kentalnya motivasi kepentingan individu (masyarakat Kebumen) ketimbang kepentingan kelompok menurut beberapa pengurus majlis merupakan wujud dari pemahaman dan keyakinan mendasar terhadap ajaran Kyai tentang strata *syari'at*, *thariqat*, *hakikat* dan *ma'rifat* guna memperdalam aspek spritualitas, walau pada aspek lain bahwa sema'an dan mujahadah adalah tempat pertemuan antar masyarakat desa/ kecamatan, antar tokoh agama dan politisi, dan lain sebagainya menyatu pada kegiatan, motivasi dan tujuan yang sama bagi kalangan tertentu dipahami dan diyakini sebagai momentum yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan, selagi masih dapat dimanfaatkan, bahkan media termudah, efektif dan efisien dalam rangka "kunjungan" ke kantong-kantong basis umat di pedesaan, dibanding perhelatan-perhelatan masa dan berbagai bentuk mobilisasi lainnya dengan meski juga memakai idiom-idiom, simbol dan logika keagamaan, dapat disaksikan terutama dalam momentum politik penting seperti menjelang kampanye Pemilu.

Deskripsi terhadap fenomena saling memanfaatkan dan saling memahami antara masing-masing pihak yang terlibat, hal yang sangat sulit untuk dipungkiri terutama hadirnya motivasi politik individu, yaitu adanya motivasi kepentingan individu yang terimplisit dan ini barangkali juga sulit bagi orang tertentu mengakui bahkan membenarkan. Mendasarkan pada definisi Max Weber pada uraian pendahuluan, nampak ada indikasi politik yang mengarah pada upaya tebar pesona di hadapan masyarakat, dengan menunjukkan kedermawanan, kehadiran dengan penuh simbol kesalehan, dan sebagainya, dengan harapan dapat memperkokoh kedudukan dan menguatkan pengaruh politiknya, atau dapat memperoleh pengakuan dari para tokoh agama khususnya dan masyarakat umumnya tentang eksistensi dirinya, dengan demikian politik menampakkan aspek ritual untuk melegitimasi dominasi (*dominance*) kekuasaan.

Terlebih tiga bulan kedepan, Kabupaten Kebumen akan melaksanakan hajatan pemilu atau pemilihan Kepala Daerah (bupati), suasana hiruk pikuknya tebar pesona para bakal calon bupati sudah sangat terasa aromanya. Bagi bakal calon dari luar Kebumen dan atau tidak memiliki akses basis massa "terpaksa" membuat team sukses lebih awal, memasang baliho di pojok-pojok persimpangan jalan, memasang iklan di mobil-mobil angkutan desa, ikut meramaikan setiap ada

kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Sangat berbeda sekali dengan bakal calon yang sudah mengakar pada basis massa (jama'ah) seperti majlis dzikir, tinggal memelihara dan memperkokoh dengan cara membangun justifikasi batiniah, yang juga secara implisit menjadi legitimasi dasar bagi dominasi itu sendiri, yang oleh Weber diklasifikasikan dalam otoritas *gift of grace* (dominasi kharisma) personal dan hal ini luar biasa 'menguntungkan'.

Korelasi dari marak dan meriahnya mujahadah dzikir akhir-akhir ini sebagai *wasilah* mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan semakin tingginya intensitas mobilisasi massa dan melibatkan banyak kalangan kepentingan dari berbagai stratifikasi sosial, terutama melalui hegemoni para birokrasi sebagai fasilitator satu sisi, dan para politisi partai sisi yang lain, semakin memperjelas hubungan indikasi kepentingan politik, dengan adanya rencana agenda pemilu bupati April 2010. Sosok KH. M. Nashiruddin sebagai bupati dan sekaligus ketua dewan harian majlis dzikir adalah tokoh sentral yang memiliki dominasi kharisma, hal ini menurut Hartono dan Cholid Anwar serta beberapa sumber informasi lainnya akan mempermudah bagi KH. M. Nashiruddin upaya mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kebumen, tentu saja dengan mempertimbangkan 'mesin politik' yang akan ditumpangi. Begitu juga dengan H. Rustriyanto (sekarang sebagai wakil bupati) akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kebumen mendatang, dengan 'mesin politik' PDI Perjuangan.<sup>6</sup>

Kehadiran dan ketersediaan waktu H. Rustriyanto selaku kader PDI-P (nasionalis) dan pelaku politik praktis dalam keterlibatan setiap diadakan ritual keagamaan berskala massa besar (kabupaten) nampaknya tidak sebatas mengejar atau menumpang dominasi kharisma KH. Nashiruddin, tetapi lebih jauh daripada dominasi legalitas, karena keyakinan pada keabsahan *statuta legal* dan "kompetensi" fungsional yang didasarkan pada pranata yang diciptakan secara rasional, tetapi lebih jauh, menurut Amiruddin ada upaya menetralsir atau mengimbangi dominasi kharisma yang sudah terbangun dan terpelihara secara mapan oleh KH. Nashiruddin,<sup>7</sup> meski hasil akhir tindakan politik menurut Weber sering kali berada dalam hubungan yang betul-betul tidak memadai dan bahkan sering kali bertentangan dengan maksud awalnya.

Meskipun demikian, fenomena sema'an dan dzikir sebagai ritual keagamaan tanpa sengaja telah mempengaruhi alam pikiran umum yang meluas di kalangan masyarakat Kebumen dengan konsekuensi logis memuat berbagai keyakinan agama dan politik. Mengingat masyarakat Kebumen, yang mayoritas berdomisili di pedesaan sebagai masyarakat agraris cenderung sangat paternalistik

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Hartono (Dosen SKI dan SPI STAINU Kebumen); Cholid Anwar (Anggota KPU Kebumen), tanggal 2 Desember 2009.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Amirudin (Kepala Desa Kebunsari Petanahan & Jama'ah mujadah yang selalu menghadiri kegiatan Majelis Dzikrul Ghofilin), tanggal 6 Desember 2009

dan terkadang bersikap irrasional, hal ini mempermudah bagi semua pihak dalam upaya pembentukan sikap keagamaan dan sikap politiknya.

Kegairahan harmonisasi “religio-politik” yang digambarkan, pada paparan terdahulu, semakin memperjelas asumsi dasar bahwa mujahadah Dzikirul Ghofilin pada akhirnya sebagai salah satu ritual keagamaan yang dapat menjadi arena tawar menawar kepentingan politik para individu tertentu, namun juga tetap mengacu pada kepentingan kelompok. Terlepas dari banyaknya kalangan yang mengkhawatirkan, bahwa kegairahan tersebut dapat menggeser fungsi-fungsi substantif dan profetik keberagamaan yang semestinya menawarkan *rahman* dan *rahiem* kemanusiaan yang teduh, damai, mencair, ukhuwah, dan pola hubungan sosial yang lebih tulus serta menawarkan keselamatan untuk semua. Tegasnya sema’an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah kegiatan panyuwonan (permintaan) dengan mengingat kepadaNya, sehingga dapat beribadah dengan ikhlas akhirnya mencapai ketenangan batin, inklusif ada harapan baru bagi pembentukan peradaban masa depan yang lebih memberi jaminan kedamaian dan keselamatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### D. Pemaknaan Sema’an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin: Subordinasi dan Paradoksi dalam keberagamaan masyarakat

Konsekuensi logis dari marak dan meriahnya Sema’an dan Mujahadah, inklusif dampak yang ditimbulkan, perspektif pengurus majlis dzikir dipahami dan diyakini bermakna proses pendidikan Islam dan dakwah (*syi’ar*) pembangunan masyarakat Kebumen dengan konsepsi dasar “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu pengembangan masyarakat yang selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan serta meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dalam pembangunan (*insan kamil*). Namun adanya kecenderungan memobilisasi masyarakat di tiap desa/ kecamatan oleh koordinator ditiap kecamatan, guna mensukseskan secara kuantitas jama’ah merupakan kenyataan yang selalu terjadi di setiap kegiatan.

Berkumpulnya banyak jama’ah dari berbagai stratifikasi sosial, bahkan keterlibatan para birokrat dan pelaku politik praktis tentu sesuatu hal yang dipandang menggembirakan, walau sisi lain dipandang memberi peluang masuknya kepentingan lain sebagai implikasi logis untuk terjadinya pertukaran kepentingan politik antar para pihak. Memahami motivasi masyarakat mengikuti kegiatan dzikir, lebih dimaknai pada harapan mendapatkan nilai ibadah yang dituju, disamping karena prosesi sema’an dan pengamalan wirid mujahadah Dzikirul Ghofilin secara bersama-sama mengandung makna silaturrahim, dan

didukung oleh mudahnya pengamalan tanpa ada ketentuan *bai'at* (sumpah) sebagaimana halnya bila mengikuti/ masuk anggota *thoriqah-thoriqah muktabarah* yang ada di Pondok Pesantren wilayah Kebumen.

Pada dasarnya tujuan (*niat*) mengikuti kegiatan, khususnya mujahadah sangat bervariasi, sangat ditentukan oleh persoalan dan motivasi kepentingan yang melingkupinya. Harapan nilai ibadah yang terpenting bagi masyarakat adalah ketika mengikuti mujahadah dapat merasakan secara bathiniah dampak nyata berupa pikiran menjadi tenang, tenteram, damai walaupun dalam kehidupan tidak lepas dari cobaan Allah SWT, tetapi akan mendapatkan kekuatan kesabaran dan diberi jalan keluar atas cobaan serta selalu tawakkal kepada Allah SWT, bahkan bagi masyarakat tertentu justru adalah hasil air *tabarru'* (air berkah) dari baca-bacaan ayat, shalawat, syair dan do'a-do'a bersama dari pengamalan dzikir tersebut.

Bila mujadah dimaknai oleh Majelis Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kebumen adalah sebuah proses pendidikan Islam dan dakwah (*syi'ar*) pembangunan masyarakat, tentu juga dapat dipahami dalam arti yang luas, sebagai "semua perbuatan dan usaha dari para Kyai (alim ulama) untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya (orang menamakan hal ini juga "*mengalihkan*" kebudayaan) kepada masyarakat para jama'ah mujahadah, sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, terutama aspek rohaniyah". Proses pendidikan bathiniah melalui dakwah mengajak pada kebaikan guna memanusiakan manusia hingga akhirnya selalu ingat dan mampu melaksanakan fungsi dan tugas hidupnya secara bertanggung jawab, berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Inilah menurut pengurus majlis, sebuah prinsip dasar sebagai *wasilah* yang akan mengantarkan masyarakat kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Ketika tujuan pelaksanaan mujahadah dzikir mencerminkan fungsi-fungsi substantif dan profetik keberagamaan yang menawarkan *rahman* dan *rahiem* kemanusiaan yang teduh, damai, mencair, ukhuwah, dan pola hubungan sosial yang lebih tulus serta menawarkan keselamatan untuk semua. Namun sisi lain, ada pihak yang keterlibatannya membawa motivasi kepentingan yang berbeda, dan hal ini sangat sulit dicermati hingga menampakkan pola dan perilaku yang menggambarkan eksistensinya di hadapan para jama'ah.

Agama memang ketika diaktualisasikan di masyarakat, harus persinggungan dengan kepentingan-kepentingan sosial lainnya, termasuk kepentingan politik, hal ini sudah menjadi tradisi yang lazim dalam masyarakat Islam klasik, namun oleh Hartono, fenomena tersebut memunculkan sebuah persoalan yang cukup mendasar, yaitu seberapa jauh persinggungan itu memberikan sumbangan kebaikan bagi bangunan peradaban hidup

kemanusiaan. Bila fungsi terdalam dari agama benar-benar dapat mempengaruhi corak kehidupan politik masyarakat, maka merupakan sesuatu pertanda baik bagi kehidupan. Yang dikhawatirkan adalah hal yang sering terjadi, bahwa proses dan kepentingan politik tetap berjalan dengan cara dan polanya sendiri, yaitu untuk pemupukkan kekuasaan demi kekuasaan, sementara agama tetap tidak lebih hanya sekedar faktor legitimasi atau alat mencapai tujuan, sehingga fungsi agama dalam proses politik lebih berorientasi sebagai pendukung *status-quo* kekuasaan, bukan sebagai faktor penggerak perubahan yang bersifat transformatif bagi pencerahan peradaban masyarakat.<sup>8</sup>

Dinamika majlis dzikir yang dimotori Nashiruddin, dengan mencoba memanfaatkan perangkat birokrasi dipahami sebuah gejala pemahaman dan aktualisasi terhadap tradisi politik Islam klasik, tanpa disadari selaku bupati telah melakukan harmonisasi agama dan politik pada proses sekularisasi agama di Kebumen khususnya. Artinya secara implisit melakukan perlawanan terhadap karakteristik *Polity-Separation Seculari-zation*, yakni perlawanan atas proses panjang kehidupan kenegaraan yang selama ini mencerminkan adanya pemisahan jagad politik dari agama, sehingga dipandang perlu islamisasi birokrasi disamping mendasarkan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kesadaran tentang pentingnya islamisasi birokrasi menurut Makhrur adalah pemaknaan santri terhadap politik, harmonisnya agama dan politik dapat menghilangkan spekulasi yang berkembang tentang adanya potensi politik kekuasaan. Pola pembangunan ini oleh David Ckorten sebagaimana dikutip Moh. Ali Aziz dkk, memberi makna terhadap pembangunan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia.

Pembangunan memang selayaknya ditunjukkan untuk mencapai sebuah tahapan standar kehidupan yang menjamin kebutuhan dasar manusia yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual (Aziz, Suhartini dan Halim, 2005: 5).

Kekhawatiran banyak kalangan pada persinggungan agama dan politik, termasuk masyarakat Kebumen pada dasarnya sangat beralasan. *Pertama*, adakah jaminan bahwa keterlibatan birokrasi dan politisi sebagai potensi persinggungan agama dengan politik itu tidak menggiring masyarakat muslim Kebumen pada perebutan-perebutan kepentingan politik jangka pendek dan dapat menuai ketegangan-ketegangan antara sesama muslim dalam kehidupan masyarakat yang

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Hartono (Dosen Sejarah Kebudayaan Islam dan Sejarah Peradaban Islam STAINU Kebumen), tanggal 2 Desember 2009.

bertentangan dengan tujuan profetik agama secara luas. *Kedua*, bagaimana amalan dzikir sebagai bagian dari pengamalan agama dapat menjadi faktor kendali dan memberi makna moralitas dalam proses politik, sebagaimana sering dijadikan alasan pembenar ketika masyarakat muslim dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan mobilisasi untuk sebuah pertukaran kepentingan politik namun atas nama agama.

Persinggungan agama dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan kesalingterkaitan antara berbagai segi kehidupan masyarakat, tetapi lebih mendasar lagi pada peranan agama yang demikian fundamental dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya sekularisasi agama tetap berfungsi dalam kehidupan umumnya. Kecenderungan demikian, berlangsung sampai saat ini, kendati orientasi keberagamaan akhir-akhir ini mulai lebih bergeser pada penghayatan spritualitas daripada verbalitas kelembagaan.

Kecenderungan mobilisasi masyarakat pedesaan oleh koordinator majlis kecamatan, meski dalam rangka mengajak pada nilai kebaikan, yang demikian pragmatis dan penuh gairah itu dalam jangka panjang dimungkinkan justru akan memarginalisasikan fungsi profetik agama dalam kehidupan sebagaimana klaim dalam proses politisasi agama selama ini. Barangkali disinilah, menurut Hartono pentingnya kearifan dan kejujuran para tokoh agama dalam memandu kehidupan umat, dalam arti hendak dibawa kemana sebenarnya masyarakat muslim Kebumen yang begitu *khusu'* dalam beribadah, *takzim* pada pimpinan umat dan haus akan makna ketenangan, ketenteraman, kedamaian bahkan kesejatian hidup ditengah dunia yang penuh cobaan sekarang ini.

Bila para tokoh agama sangat bersemangat terlibat dalam mobilisasi masyarakat untuk kepentingan tertentu, atau para tokoh politik berhasil menancapkan *dominasi legalitas*, karena keyakinan pada keabsahan *statuta legal* dan "kompetensi" fungsional yang didasarkan pada pranata yang diciptakan secara rasional, sehingga dapat menguasai tokoh agama, disadari atau tidak, maka jangka panjang yang akan muncul adalah: perseteruan dan perebutan kepentingan secara keras antar kelompok dalam masyarakat atas nama agama. Meskipun dalam konteks kegiatan Mujahadah Dzikirul Ghofilin belum memberikan indikasi ke arah yang sesungguhnya, baru sebatas implikasi logis dari sebuah dinamika. Namun bila itu terjadi, dapat dipastikan masa mendatang akan muncul dua kecenderungan eksterm yang bermuatan motivasi kepentingan dan dalih keagamaan, dan hal ini menurut Haedar Nashir adalah gejala umum.

Kecenderungan *Pertama*, berupa subordinasi masyarakat beragama atau bahkan agama kepada kepentingan kekuasaan yang mapan, atau; yang *Kedua* memunculkan radikalisasi politik atas nama agama, sehingga nilai luhur agama menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan arogansi kekuasaan atau

sebaliknya anarkhi dan kekerasan, karena masyarakat beragama, lebih-lebih para tokohnya terlibat dalam proses perebutan kepentingan politik sesaat yang membuat mereka tidak berada dalam posisi yang jernih dan berjarak untuk memainkan fungsi profetik agama sebagai pencerah kehidupan. Memang tidak mudah untuk beragama secara jujur, benar dan penuh ketulusan ketika dunia ini sarat dengan tawaran-tawaran sesat yang serba menggiurkan (Nashir, 1999: 112).

Gerak langkah majlis dzikir selama ini cenderung stabil, adanya Implikasi logis, menurut H. Makhrur AM akhir-akhir ini lebih menunjukkan gejala kenaikan intensitas musiman, situasi dan kondisi menjelang pemilihan bupati, walaupun tingkat kesadaran aktualisasi beragama dan semangat beragama di masyarakat hampir merata di Kabupaten Kebumen, hal ini tidak jauh berbeda dengan segala kesemarakan tradisi rutinitas masyarakat pada “maulidan dan rajaban” dan sebagainya. Mujahadah sebagai ritual keagamaan yang banyak melibatkan para pejabat daerah, para elit politik, yang mengesankan kesemarakan *spritual* di tubuh masyarakat dan daerah adalah hal yang wajar-wajar saja.<sup>9</sup>

Meski pada akhirnya, fenomena yang ada seakan-akan posisi agama secara profetik tidak lebih dari subordinasi dari dominasi politik kekuasaan, baik kekuasaan sosial di mana komunitas masyarakat beragama itu berada melalui otoritas para tokoh agama, maupun dalam dominasi kekuasaan politik yang tengah berkuasa saat ini. Persentuhan agama dan politik seperti terlihat pada fenomena mobilisasi masyarakat selain memunculkan masalah subordinasi agama pada dominasi kepentingan politik, pada saat bersamaan memunculkan masalah lain yang tidak kalah dilematis yang dapat disebut pula sebagai paradoks dalam keberagamaan.

Situasi dan kondisi kegairahan beragama masyarakat Kebumen yang mencari bentuk *spritual* yang substantif, inklusif dan sublimatif itu tengah tumbuh subur. Pada saat bersamaan, justru masyarakat ditontonkan “tebar pesona”, tebar kedermawanan sosial yang secara tidak sengaja masyarakat dilibatkan dalam kegairahan yang lain yang bersinggungan dengan motivasi kepentingan politik para elit guna meraih kepentingan jangka pendek dan sarat dengan godaan perseteruan atas nama agama.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan H. Makhrur Adam Maulana (Mantan Wakil Ketua DPRD 2004-2009 dan Ketua Tanfidziyah PKB Kebumen), tanggal 2 Desember 2009.

## BAB V

### PERSINGGUNGAN AGAMA DAN POLITIK

#### A. Perubahan Dinamika Politik

Aroma perubahan dinamika perpolitikan Kebumen, memang akhir-akhir ini cenderung menunjukkan gejala saling berkopetesi, hal ini umumnya juga terjadi pada daerah merencanakan hajatan pemilihan kepala daerah. Pemilu memilih bupati selalu dianggap oleh sementara orang sebagai momentum yang menentukan bagi perjalanan daerah, banyaknya harapan yang dijanjikan untuk masa mendatang diduga yang menumbuhkan gairah dan kalkulasi politik yang relatif tinggi dikalangan kekuatan-kekuatan sosial dan politik di daerah.

Pada masyarakat Kebumen yang mayoritas beragama Islam (*homogen*), kompleksitas keterlibatan media agama dan keagamaan dalam politik tentu tidak serawan masyarakat *heterogen* dalam kepemelukan beragama, namun prinsipnya, keterlibatan masyarakat beragama dalam proses politik dengan jelas berpotensi mengundang ketegangan dan konflik kepentingan politik atas nama agama.

Fenomena marak dan meriahnya setiap ritual keagamaan, tidak terkecuali sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin memunculkan rasa optimisme tertentu di kalangan masyarakat Kebumen. Kalangan masyarakat pedesaan, khususnya jama'ah dzikir, rasa optimisme itu bahkan tampak terkesan menggelora dan sering diidealisasikan secara romantis sebagai iklim baru keberagamaan yang menunjukkan bersatunya ulama dan umara (penguasa) dalam satu bingkai kehidupan sosial keagamaan, bahkan begitu semangatnya, tidak jarang dijadikan momentum oleh para tokoh partai politik dan kalangan tertentu (para bakal calon bupati dan team suksesnya) atau aktor lainnya sebagai "komoditi politik" yang berusaha meraih akses kepentingan politik tertentu (simpati), yang membuat sebagian jama'ah tidak menyadari jika mereka terjebak pada mobilisasi kepentingan politik.

K.H. M. Nashiruddin hingga saat ini belum secara tegas akan mencalonkan kembali sebagai bupati, tetapi banyak pihak menjelaskan arah pembicaraan akan mencalonkan kembali sudah nampak, tinggal menunggu waktu. Meski demikian, peran K.H. M. Nashiruddin, selaku bupati dan tokoh sentral dalam mujahadah dzikir, tidak menampakkan gejala (indikasi) membawa muatan politik, apalagi sampai mengarah pada subordinasi agama atas dominasi kepentingan politik. Kecenderungan komitmen yang ada, justru masih memanfaatkan dan mempertahankan gejala kondisi masyarakat kebumen yang agamis di satu sisi, dan realitas sebagian masyarakat tengah dilanda kehausan

atau kehampaan spritual (*lost of soul*) di sisi lain, meski belum sampai ke taraf kehilangan makna hidup (*chaos*) akibat kehidupan mederen yang salah arah dan salah kaprah.

Indikasi tersebut menurut oleh H. Bambang Sucipto, menunjukkan adanya komitmen kuat para pengurus majlis mujahadah, untuk selalu bersih dari kontaminasi politik atau motivasi kepentingan politik jangka pendek, walaupun ada, masih satu garis politik (kepentingan politik), sebelum kegiatan mujahadah, sambutan selaku pengurus majlis “tidak pernah menyinggung atau membawa sambutan ke arah politik”, sehingga tidak menunjukkan identitas selaku bupati (penguasa) yang sarat dengan politik; dan kegiatan mujahadah terbuka untuk umum (kepada siapapun) boleh memohon menjadi tuan rumah (*ngondoh*), kehadiran beliau tidak ada perbedaan antara satu tempat dengan tempat lainnya (monoton).<sup>1</sup>

Bila dinamika majlis dzikir masa sekarang dibandingkan dengan masa-masa sebelum kepemimpinan KH. M. Nashiruddin, nampak jelas kelebihan dan kekurangannya. Menurut KH. Ali Mu'n Amnur dan Amiruddin kelebihan yang sangat nampak akhir-akhir ini adalah munculnya semangat sebagian para birokrasi ikut ambil bagian dalam aktivitas mujahadah dzikir, bahkan banyaknya tokoh politik yang memanfaatkan momentum banyaknya kehadiran jama'ah dari berbagai penjuru desa di Kebumen. Sisi lain, kelemahan yang sangat nampak adalah menurunnya kuantitas jama'ah.<sup>2</sup>

Kehadiran KH. M. Nashiruddin dalam setiap kegiatan dzikir adalah kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat pedesaan selaku jama'ah dzikir, karena dominasi kharismanya sudah mengakar kuat di hati mereka, ditambah lagi adanya informasi beliau akan mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kebumen, begitu juga dengan kehadiran H. Rustriyanto (sekarang sebagai wakil bupati) akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kebumen mendatang, hal ini secara implisit memberi gambaran kepada masyarakat adanya dua kekuatan atau lebih yang akan berkompetisi dalam pemilihan bupati mendatang. Masing-masing kekuatan akan memanfaatkan momentum yang tersedia, termasuk memanfaatkan agama yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kelas sosial dan politik, keterkaitan itu bahkan berlangsung dengan hadirnya tokoh-tokoh partai politik dari golongan Islam dan nasionalis.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan H. Bambang Sucipto (Kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen), 2 Desember 2009.

<sup>2</sup>Wawancara dengan KH. Ali Mu'in Amnur (Tokoh Masyarakat Tanjungsari Petanahan); Amirudin (Kepala Desa Kebunsari Petanahan & Jama'ah mujadah yang selalu menghadiri kegiatan Majelis Dzirkul Ghofilin), tanggal 6 Desember 2009

Ritual keagamaan yang semula bermakna memberikan sumbangan kebaikan bagi pembangunan peradaban hidup kemanusiaan, ketika dimasuki unsur-unsur politik, maka dalam kepustakaan sosiologi, dipahami telah terkontaminasi proses politik, sehingga wajar bila setiap ada kegiatan mujahadah dzikir, di manapun tempatnya memunculkan spekulasi dan kecurigaan beberapa pihak terhadap eksistensinya, hal ini sebagai dampak negatif dari persinggungan kepentingan agama dan kepentingan politik, meski dalam tingkat lokalitas Kebumen.

## B. Respons masyarakat luar terhadap majlis dan mujahadah Dzikrul Ghofilin

Aktivitas Majelis Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kabupaten Kebumen berupa sema'an dan mujahadah setiap malam Kamis Pon telah dimaknai sebagai *mujahadah panyowonan* atau mujahadah permintaan kepada Allah SWT melalui berbagai ritual *wiridan* yang sudah ditentukan, baik bacaan maupun jumlah yang harus dibaca oleh para pengamal. Adapun eksistensi mujahadah dzikir, pada dasarnya adalah salah satu ibadah tambahan sekaligus jalan (*wasilah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan dapat dimaknai mendekatkan diri pada Rasulullah SAW dan para ulama-ulama terdahulu.

Respons masyarakat secara umum, lebih terfokus pada sosok KH. M. Nashiruddin yang berperan ganda. Terkenalnya KH. M. Nashiruddin di kalangan jama'ah dzikir ketimbang pendahulu-pendahulunya sebagai tokoh sentral majlis sema'an dan mujahadah, lebih dikarenakan sebelumnya sebagai da'i populer, Pengasuh PP al-Taqwa dan sekaligus *mursyid* kelompok *Thoriqah Syadziliyah* yang sebelumnya sudah memiliki ribuan anggota di seluruh Kebumen, bahkan ayahnya mantan panglima AUI dan dia sudah aktif dalam organisasi NU semenjak masih menuntut ilmu di tingkat menengah, bahkan Sema'an dan Mujahadah Dzikrul Ghofilin 'Mantab' Kebumen, seringkali diidentikkan dengan ketokohnya.

Maraknya ritual keagamaan berupa mujahadah dzikir di ruang publik masyarakat Kebumen sebenarnya bukanlah hal baru, hanya saja mulai terasa sangat menonjol akhir-akhir ini, dimana KH. M. Nashiruddin berperan ganda, selaku pemimpin majlis sema'an dan mujahadah Dzikrul Ghofilin sekaligus menjabat Bupati Kabupaten Kebumen di penghujung 2009 menggantikan Hj. Rustriningsih. Sejak kepemimpinan KH. M. Nashiruddin selaku bupati, para tokoh politik dan birokrasi mulai banyak menyertainya, terlebih April 2010 mendatang akan diadakan pemilihan bupati kembali.

Gejala ini secara kebetulan didukung oleh situasi dan kondisi beberapa tahun terakhir di Kebumen, orientasi keberagaman substantif dan inklusif

seperti dipaparkan di atas, terus digalakkan oleh pendahulunya Hj. Rustriningsih guna memelihara eksistensinya (*legitimasi*) sebagai pejabat publik di kota santri, yang oleh banyak kalangan pedesaan dipahami sebagai harapan baru bagi pembentukan peradaban masa depan yang lebih memberi jaminan kedamaian dan keselamatan dalam kehidupan bangsa di daerah.

Mencermati sejumlah perkembangan yang positif seputar keairahan atau kesemarakkan, bahkan kesadaran beragama di Kabupaten Kebumen, maka akan ditemui beberapa indikator kegiatan keagamaan di kampung-kampung ketika bulan maulid, bulan rajab, cenderung selalu meningkat, kegiatan dan suasana ibadah bulan Ramadhan semakin membaik, peminat ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat secara kuantitas, sampai-sampai harus antri hingga kouta tahun 2012 yang masih terbuka, para pejabat birokrasi, pengusaha/pedagang pasar, dan kelompok menengah perkotaan semakin giat menekuni dan berkhidmat dalam berbagai ritual keagamaan. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan ritual keagamaan sebagai upaya memelihara eksistensi agamanya, seiring dengan peningkatan ekonomi (pendapatan dan daya beli masyarakat).

Mensikapi mobilisasi di desa oleh koordinator majlis, banyaknya tokoh politik dan birokrat yang terlibat dalam arti persinggungan kepentingan, namun para jama'ah masyarakat pedesaan nampaknya cukup menerima secara baik dalam arti "tidak begitu peduli" terhadap apa yang terjadi, hal ini ditunjukkan oleh para jama'ah yang selalu khusus berdo'a dan aktif mengikuti wiridan mujahadah dzikir yang dituntun oleh imam mujahadah. Berbeda dengan respon masyarakat luar selaku pemerhati pola mobilisasi pengurus majlis dan mujahadah Dzikirul Ghofilin yang pada pelaksanaannya dipenuhi/ dihiasi oleh berbagai persinggungan kepentingan politik. Masyarakat luar umumnya mensikapi cukup bervariasi, namun bila disederhanakan dapat diklasifikasikan, pada sikap menolak sama sekali (*resistensi*) terhadap kepentingan politik dan sikap yang didasarkan pada keraguan (tidak mengerti).

Mereka yang menolak umumnya berpendidikan menengah ke atas (*rasional*), dan beranggapan, mujahadah seharusnya bukan ajang menunjukkan tebar pesona, pameran kedermawanan, apalagi motivasi kepentingan politik, sehingga tidak pantas dilakukan pada mujahadah dzikir yang sarat dengan bacaan-bacaan *thayyibah*, yang pada akhirnya tercampuraduk antara kepentingan agama dan kepentingan politik, walaupun sikap mereka cukup fundamental pada pemahaman agama, sejatinya pemahaman mereka terhadap agama tidak begitu memadai. Adapun mereka yang ragu-ragu, umumnya juga berpendidikan menengah ke atas, namun mereka ketika diajak bicara cenderung tidak memberi tanggapan dan sekali-kali menjawab tidak banyak mengerti.

Hal yang sangat menarik, adalah sikap masyarakat pedesaan yang umumnya "tidak begitu peduli" terhadap apa yang terjadi ketika mujahadah

berlangsung, namun sisi lain ada harapan sebagian para ibu-ibu “muslimat” jama’ah dzikir terhadap KH. M. Nashiruddin untuk tidak mencalonkan diri sebagai bupati pada pemilihan April 2010, sehingga Kyai Nashiruddin bisa lebih fokus pada pembinaan masyarakat di Kebumen melalui berbagai kegiatan keagamaan. Berbeda dengan pengurus majlis dzikir, ketika dimintai komentar tentang rencana pencalonan Kyai Nashiruddin, umumnya mendukung, terlepas dari otoritas yang dimiliki, karena demokrasi memberi peluang untuk berbuat kebaikan lebih banyak.

### C. Majlis Dzikrul Ghofilin Sebagai Media Silaturahmi Politik

Kesadaran masyarakat Kebumen, khususnya para jama’ah dzikir mengikuti berbagai aktivitas yang dilaksanakan majlis dzikir lebih bersifat tuntutan spritualitas dalam menghadapi kehidupan, bahkan bagi masyarakat tertentu mujahadah dzikir semakin memberikan optimesme tertentu setelah terbukanya untuk umum dalam pengamalannya, terlebih setelah KH. M. Nashiruddin selaku ketua dewan harian sekaligus sebagai bupati, maka melahirkan wacana semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah daerah, yang ditandai kehadiran para birokrat dan politisi bahkan memberi kesan betapa makin kondusif kehidupan beragama di daerah Kebumen.

Terkorelasinya tuntutan spritualitas masyarakat dengan misi utama majlis dzikir dalam rangka proses pendidikan Islam dan dakwah (*syi’ar*) pembangunan masyarakat Kebumen dengan konsepsi dasar “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya”, tentu saja perlu menjadi catatan penting, artinya kondisi yang positif itu masih perlu dicermati dan dianalisa secara mendalam “apakah agama dan kegairahan beragama itu sejatinya telah memasuki dimensi yang substansial atau barangkali hanya sebatas kesemarakan tingkat permukaan”

Majlis dzikir sebagai sebuah mosaik keberagaman, memang tumbuh semaraknya kegairahan ritual keagamaan yang mengandung dimensi spritualitas tinggi dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kebumen. Namun bila kegairahan *ritual-spritual* itu tidak menumbuhkembangkan kesholihan secara essensi dan utuh, baik pada level individual maupun kolektif masyarakat, maka wajar bila sekelompok orang masih memandang hal itu baru pada tataran permukaan, belum merupakan kegairahan essensial terlebih fungsional. Pengembangan spritualitas masyarakat melalui berbagai aktivitas mujahadah dzikir yang selalu ditengarai melalui mobilisasi massa oleh koordinator kecamatan di tiap desa, barangkali dapat dipahami guna mensukseskan secara kuantitas jama’ah dzikir dan mengajak pada kebaikan, meski merupakan kenyataan yang selalu terjadi di setiap kegiatan.

Keberhasilan mobilisasi massa dalam setiap kegiatan mujahadah dzikir dan menghadirkan suasana yang sangat agamis, *khusu'* dan bersahaja, pada tataran praktis telah menjadi magnet yang sangat efisien bagi pelaku politik praktis, pejabat birokrat daerah untuk memperkenalkan eksistensi kesholihan dirinya di hadapan jama'ah dzikir dan atau memelihara hubungan baik dengan masyarakat sebagai obyek kepentingan dan berbagai komponen masyarakat lainnya, bahkan 'dipandang' cukup efektif untuk terjadinya proses pertukaran (tawar-menawar) kepentingan itu sendiri, inklusif bagi agama untuk semakin memperjelas posisi bersinggungan dengan aspek-aspek politik dan kehidupan secara umum.

Kehadiran kelompok rasionalis (pelaku politik dan birokrasi) di tengah-tengah kelompok paternalistik dan irrasional telah memberikan pemaknaan yang mencerminkan kombinasi unsur-unsur masyarakat daerah. Bagi pengurus majlis dzikir, hal ini mempermudah upaya islamisasi birokrasi atau mendekatkan kegiatan keagamaan pada konteks kenegaraan, guna memperjuangkan misi utama melalui kegairahan spritual mujahadah Dzikirul Ghofilin telah mencapai target.

Paling tidak, bertemunya berbagai kepentingan dalam satu wadah yang sangat kondusif bagi agama melalui prosesi ritual dzikir, *bertawassul* kepada Allah dan RasulNya, secara bersama-sama masyarakat muslim Kebumen dengan harapan menjadi hamba Allah yang baik, yang selalu berdo'a memohon keselamatan kehidupan, yang pada level individual berupaya menumbuhkan kesadaran pemaknaan bagi jama'ah umunya akan sifat *sidiq, amanah, tabligh* dan *fatonah* serta mengikuti sifat-sifat Nabi lainnya. Adapun pada level kolektif ada upaya menumbuhkan kesadaran hidup bersih lahir-bathin, jujur, adil, tidak korupsi, peduli dengan sesama dan sebagainya.

Kombinasi unsur-unsur semacam itu tidak mempunyai makna atau pesan tunggal dan interpretasi terbaik pastilah harus mempertimbangkan jaringan kompleks pemaknaan dalam konteks yang berkembang. Satu hal adalah jelas, bahwa pelaku politik semakin terdorong untuk mendemonstrasikan bahwa tidak ada kontradiksi inheren atau ketidak-selarasan kognitif yang terkait dengan matriks identitas keagamaan kontemporer. Seseorang dapat tampil 'sholeh' dan barangkali pada saat yang sama sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik yang lebih mapan dan berakhir pada tujuan ekonomi.

Apapun alasannya, barangkali inilah gambaran pembuktian mazhab Weberian pada uraian pendahuluan di atas bahwa "agama pada kenyataannya adalah ekonomi, begitu juga politik pada kenyataannya adalah agama". Kegairahan "religio-politik" yang melebihi ambang batas, dapat menggeser fungsi-fungsi substantif dan profetik keberagamaan yang semestinya menawarkan *rahman* dan *rahiem* kemanusiaan yang teduh, damai mencair,

*inklusif, ukhuwah*, dan pola hubungan sosial yang lebih halus dan menawarkan keselamatan untuk semua.

Eksistensi majlis dzikir ‘Mantab’ diyakini sebagai media (*wasilah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus media silaturahmi antar masyarakat yang berasal dari berbagai penjuru desa Kebumen, sehingga seberapapun, komitmen, idealitas yang dituju dan diperjuangkan, dengan menentukan larangan (steril) bagi pelaku politik untuk terlibat aktif, pada akhirnya ritual keagamaan dzikir harus bersinggungan dengan masuknya unsur-unsur politik, karena suasana sekaligus wacana berkumpulnya masyarakat adalah moment terpenting untuk menunjukkan eksistensi kesholehan tokoh politik, menancapkan dominasi kharismatik hingga dominasi legalitas. Hal ini secara eksplisit tidak terkecuali KH. M. Nashiruddin adalah pelaku politik, yang akan mencalonkan diri pada Pemilu (pemilihan Kepala Daerah) April 2010, yang secara politik kenegaraan tetap membutuhkan dominasi legalitas, meski sangat menguasai dominasi kharismatik.

## BAB VI

### KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian mengenai Agama dan Politik (Studi tentang Majelis Dzikirul Ghofilin ‘Mantab’ Kabupaten Kebumen sebagai media silaturahmi politik). Pada bagian ini saya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bab pendahuluan. Sebelum sampai pada usaha menjawab pertanyaan tersebut, perlu menjelaskan tentang Sema’an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin adalah salah satu khazanah ritual keagamaan masyarakat Islam, yang pada dasarnya merupakan sumbangan positif bagi bangunan peradaban hidup kemanusiaan.

Aktivitas Sema’an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin dikelola oleh sebuah kepengurusan, yaitu Majelis Sema’an Al Qur’an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin ‘Mantab’ Kebumen. Dalam aktivitasnya, berupa sema’an dan mujahadah setiap malam Kamis Pon, telah dimaknai sebagai *mujahadah panyowonan* atau mujahadah permintaan kepada Allah SWT melalui berbagai ritual *wiridan* yang sudah ditentukan, baik bacaan maupun jumlah yang harus dibaca oleh para pengamal. Adapun eksistensi mujahadah dzikir, pada dasarnya adalah salah satu ibadah tambahan sekaligus jalan (*wasilah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan dapat dimaknai mendekatkan diri pada Rasulullah SAW dan para ulama-ulama terdahulu.

Majlis ini, ternyata memiliki kecenderungan, selalu memobilisasi massa (masyarakat) dalam prosesnya yang penuh dengan idiom, simbol dan logika keagamaan. Keberhasilan mobilisasi massa dalam setiap kegiatan mujahadah dzikir dan menghadirkan suasana yang sangat agamis, *khusu’* dan bersahaja, pada tataran praktis telah menjadi magnet yang sangat efisien bagi pelaku politik praktis, pejabat birokrat daerah untuk memperkenalkan eksistensi kesholihan dirinya di hadapan jama’ah dzikir dan atau memelihara hubungan baik dengan masyarakat sebagai obyek kepentingan dan berbagai komponen masyarakat lainnya, bahkan ‘dipandang’ cukup efektif untuk terjadinya proses pertukaran (tawar-menawar) kepentingan itu sendiri, inklusif bagi agama untuk semakin memperjelas posisi bersinggungan dengan aspek-aspek politik dan kehidupan secara umum.

Selanjutnya penting menjawab tiga pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. Pertama, Bagaimana Sema’an dan Mujahadah Dzikirul Ghofilin dilaksanakan oleh masyarakat Kebumen? Seperti pada paparan terdahulu, kehadiran Mujahadah Dzikirul Ghofilin ‘Mantab’ di Kabupaten Kebumen tidak bisa dilepaskan dari konsepsi tradisi “*Ahlussunnah wal Jama’ah*” dan dominasi

kharisma sosok Kyai Hamim Djazuli (atau dikenal dengan Gus Miek). Kehadiran Mujahadah Dzikirul Ghofilin di Kebumen dimulai kurang lebih tahun 1983-an dan dimotori oleh beberapa alumni santri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur.

Ritual Mujahadah Dzikirul Ghofilin ‘Mantab’ Kabupaten Kebumen pada asal muasalnya, adalah Amalan (amaliah/ wirid) dari hasil perkawinan ijazah-ijazah para ulama, yang oleh Kyai Hamim Jazuli (Gus Miek), dikumpulkan menjadi satu dan diberi nama Mujahadah Dzikirul Ghofilin. Prosesi kegiatan, sejak 1996 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Mulai Sema’an Al Qur’an pada hari Rabu Pahing, yang dilakukan oleh beberapa orang hafidz (penghapal) Al Qur’an dan *disima’* (didengar-teliti) kanan-kiri oleh jama’ah/ melibatkan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Sema’an dibagi atas dua tahap, tahap pertama semenjak pagi hingga sore hari, pembacaan dari juz pertama hingga juz duapuluh sembilan; dan tahap kedua sudah harus dimulai setelah sholat Isya awal guna penyelesaian juz ke tigapuluh (khataman) sambil menunggu berkumpulnya para jama’ah yang akan mengikuti prosesi mujahadah, dan diakhiri dengan do’a.

Selesainya prosesi khataman dan sebelum memasuki (memulai) amalan Mujahadah Dzikirul Ghofilin terlebih dahulu para jama’ah dituntun membacakan Surat al-Fatihah yang diberikan (diniat-hadiahkan) kepada para ulama/masayyih, sesepuh masyarakat/ tokoh-tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia, khususnya hadiah kepada tokoh ulama tempat pelaksanaan Mujahadah Dzikirul Ghofilin. Dilanjutkan dengan sambutan pengurus Majelis Dzikirul Ghofilin Kabupaten Kebumen, dalam hal ini biasanya langsung dibawakan oleh Ketua I Dewan Harian Majelis Dzikirul Ghofilin untuk memberi pengarahan tentang santunan anak yatim, ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana dan seluruh perangkatnya, dan ucapan selamat datang kepada seluruh para hadirin jama’ah Mujahadah Dzikirul Ghofilin; Hal ini merupakan satu-satunya sambutan.

Kemudian dilanjutkan penyerahan santunan anak yatim; dan terakhir Muqodimah/ Pengajian sebagai kata penyejuk bagi jama’ah Mujahadah Dzikirul Ghofilin, sekaligus sebagai *tauziyah* (nasehat) atau *tazkirah* (memberi pemahaman) kepada para jama’ah tentang berbagai hal mujahadah Dzikirul Ghofilin, baik essensi maupun hikmahnya. Setelah selesai semua rangkaian prosesi pramujahadah, maka memasuki rangkaian inti pelaksanaan Mujahadah Dzikirul Ghofilin. Mujahadah tersebut dipimpin oleh seorang imam, sedangkan para jama’ah mengikuti apa yang dibacakan oleh imam hingga selesai.

Kedua, Faktor apa saja yang mendorong (*memotivasi*) keterlibatan para pelaku politik (partisipan) dalam aktivitas mujahadah Dzikirul Ghofilin?. Kajian ini dimulai dari pemahaman yang mendasari masyarakat Kabupaten Kebumen mengikuti mujahadah, yaitu ajaran-ajaran Islam dari para Kyai tentang ketentuan strata *syari’at*, *thariqat*, *hakikat* dan *ma’rifat* guna memperdalam spritualitas.

Kegiatan ritual mujahadah Dzikrul Ghofilin di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan ditemukan beberapa perbedaan, namun yang paling menarik di kawasan pedesaan, karena disamping jama'ah yang hadir sangat banyak ditambah komposisi aktor yang terlibat dari kalangan politisi partai dan pejabat publik nampak bertaburan, degan melakukan tebar pesona bahkan disertai dengan sumbangan keuangan kepada panitia pelaksana. Adapun realitas masyarakat yang membawa bungkusan berisi air putih dalam botol guna mendapatkan air *tabarru'* (air berkah) untuk dipergunakan sesuai niatnya, merupakan tradisi yang mempertegas kecenderungan masyarakat irrasional.

Faktor yang mendorong partisipan mengikuti mujahadah umumnya didasarkan pada motivasi agama yang dikembangkan melalui beberapa ajaran bahwa sema'an Al Qur'an adalah sebuah kebaikan yang tinggi, bertawassul Surat Al Fatihah kepada kepada Allah SWT dan tawassul kepada para tokoh muslim sedunia; membaca salawat untuk memperoleh syafa'at dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak, dan do'a-do'a (sya'ir) lainnya ada sebuah harapan "pahala" dari Allah SWT, termasuk apa yang diniatkan akan dikabulkan, hal ini adalah kebaikan yang mendunia dan mengakhirat. Namun tujuan terpenting bagi masyarakat adalah ketika mengikuti mujahadah dapat merasakan secara bathiniah berupa pikiran menjadi tenang, tenteram, damai, bahkan bagi masyarakat tertentu justru adalah hasil air *tabarru'* (air berkah) dari baca-bacaan ayat, shalawat, syair dan do'a-do'a bersama dari pengamalan dzikir tersebut.

Kentalnya motivasi kepentingan individu ketimbang kepentingan kelompok lebih merupakan wujud dari pemahaman dan keyakinan mendasar terhadap ajaran guna memperdalam aspek spritualitas, walau pada aspek lain bahwa sema'an dan mujahadah adalah tempat pertemuan antar masyarakat desa/kecamatan, antar tokoh agama dan politisi, dan lain sebagainya menyatu pada kegiatan, motivasi dan tujuan yang sama bagi kalangan tertentu dipahami dan diyakini sebagai momentum yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan, bahkan media termudah, efektif dan efisien dalam rangka "kunjungan" ke kantong-kantong basis umat di pedesaan, terutama dalam momentum politik penting seperti menjelang kampanye Pemilu. Deskripsi terhadap fenomena saling memanfaatkan dan saling memahami antara masing-masing pihak yang terlibat, hal yang sangat sulit untuk dipungkiri terutama hadirnya motivasi politik individu, yaitu adanya motivasi kepentingan individu yang terimplisit dan ini barangkali juga sulit bagi orang tertentu mengakui bahkan membenarkan.

Ketiga, Bagaimana persinggungan antara kepentingan agama dan politik dalam "Majlis Dzikrul Ghofilin"? Bila mujahadah dimaknai sebuah proses pendidikan Islam dan dakwah (*syi'ar*) pembangunan masyarakat secara umum, dan diyakini sebagai media (*wasilah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus media silaturrahim antar masyarakat yang berasal dari berbagai penjurur desa Kebumen, kemudian majlis berupaya memanfaatkan perangkat birokrasi

sebagai fasilitator, hingga keterlibatan para politisi partai, tanpa disadari pragmatisme dan penuh gairah itu dalam jangka panjang dimungkinkan justru akan memarginalisasikan fungsi profetik agama dalam kehidupan sebagaimana klaim dalam proses politisasi agama selama ini.

Fenomena marak dan meriahnya setiap ritual sema'an dan mujahadah Dzikirul Ghofilin di kawasan pedesaan telah memunculkan rasa optimisme tertentu di kalangan masyarakat desa Kebumen. Dengan rasa optimisme dan sering diidealisasikan secara romantis sebagai iklim baru keberagamaan yang menunjukkan bersatunya *ulama* dan *umara* (penguasa) dalam satu bingkai kehidupan sosial keagamaan. Bagi K.H. M. Nashiruddin, selaku bupati dan tokoh sentral dalam mujahadah dzikir, secara implisit dapat diakui tidak menampakkan gejala (indikasi) membawa muatan politik, apalagi sampai mengarah pada subordinasi agama atas dominasi kepentingan politik.

Namun demikian, bertemunya berbagai kepentingan dalam satu wadah yang sangat kondusif bagi agama melalui prosesi ritual dzikir, secara bersama-sama masyarakat muslim Kebumen tidak mempunyai makna atau pesan tunggal; dan interpretasi terbaik pastilah harus mempertimbangkan jaringan kompleks pemaknaan dalam konteks yang berkembang. Satu hal yang jelas, bahwa pelaku politik semakin terdorong untuk mendemonstrasikan bahwa tidak ada kontradiksi *inheren* atau ketidak-selarasan *kognitif* yang terkait dengan matriks identitas keagamaan kontemporer. Seseorang dapat tampil 'sholeh', dermawan dan barangkali pada saat yang sama sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik yang lebih mapan dan berakhir pada tujuan ekonomi.

Artinya ritual keagamaan dzikir suka tidak suka, harus bersinggungan dengan masuknya unsur-unsur politik, karena suasana sekaligus wacana berkumpulnya masyarakat adalah moment terpenting untuk menunjukkan eksistensi kesholehan tokoh politik, menancapkan dominasi kharismatik hingga dominasi legalitas. Hal ini secara eksplisit tidak terkecuali M. Nashiruddin adalah pelaku sekaligus tokoh politik, yang secara konteks kenegaraan tetap membutuhkan *dominasi legalitas*, meski sangat menguasai *dominasi kharismatik*.

Apapun alasannya, Fenomena Majelis Dzikirul Ghofilin 'Mantab' Kebumen dalam konteks silaturrahim masyarakat Kebumen ternyata menunjukkan dinamika sekaligus salah satu komodifikasi dan aktualisasi agama yang semakin meningkat di era reformasi dalam memfasilitasi kehadiran idiom, simbol dan logika keagamaan di ruang publik. Barangkali inilah gambaran pembuktian mazhab Weberian pada uraian pendahuluan di atas bahwa "agama pada kenyataannya adalah ekonomi, begitu juga politik pada kenyataannya adalah agama". Dengan demikian kegairahan "religio-politik" yang melebihi ambang batas, dapat menggeser fungsi-fungsi substantif dan profetik keberagamaan yang semestinya menawarkan *rahman* dan *rahiem* kemanusiaan.

## BIBLIOGRAFY

- Abdullah, Amin, 2000, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Abdullah, Irwan, 2009, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aziz, Moh Ali, Suhartini, Rr, dan Halim, A, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologis*, Yogyakarta: LKiS
- Beilharz, Peter, 2005, *Social Theory: A Guide to Cntral Thinkers*, Teori-teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, alih bahasa Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Collins, R, 1986, *Weberian Sociological Theory*, New Yoks: Cambridge University Press.
- Clarke, Peter B, 1998, "Agama di Erofa Kontemporer: Problem dan Prospek", dalam Mukti Ali, dkk, *Agama dan Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Dahlan, Abdul Aziz, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Bar van Hoeve,
- Hasan, Noorhaidi. (2008). "Agama, Gaya Hidup dan Politik di Kota Provinsi Indonesia", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan KITLV Leiden
- , (2009) "Muslim Youth in Provincial Indonesia Religion, Identity and Activism", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan KITLV Leiden
- Jatmika, Sidik. (2005). "Kiai dan Politik Lokal: Studi Kasus Reposisi Politik Kiai NU Kebumen Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi," *Unpublished PhD Dissertation*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kertzer, D. 1988. *Ritual, politics and power*. New Haven: Yale University Press.

- Kabupaten Kebumen, 2008, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BUPATI KEBUMEN Akhir Tahun Anggaran 2008 Kepada DPRD, Tidak Terbitkan.
- , 2008, Kebumen Dalam Angka, Kebumen In Figures, Kebumen, Kerjasama Bappeda Kabupaten Kebumen dan BPS Kabupaten Kebumen.
- Latif, Yudi, 2005, “Sekularisasi Masyarakat dan Negara Indonesia”, dalam *Islam, Negara & Civil Society*, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, editor: Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Jakarta, Paramadina.
- Mahfud, Mokhamad. (2002). “Profil Kyai Muhammad Nashiruddin al-Mansyur: Studi Kasus Munculnya Tokoh Kyai Pada Masyarakat Desa Kutosari Kebumen,” *Unpublished Undergraduate Thesis*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Nashir, Haedar, 1999, *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PP IRM
- Nawawi, Ismail, 2008, *Dzikrul Ghafilin Sebuah Tinjauan Ilmiah dan Amaliah*, Surabaya: Karya Agung.
- Pengurus Forum Komunikasi Keluarga Alumni (FORSIKA) PPI, Kitab Dzikrul Ghofilin, Chadzrotus Syech Kyai Hamim Djazuli (Gus Miek), Surabaya, Jama’ah Dzikrul Ghofilin.
- Retzer, G, Goodman, DJ, 2009, *Sociological Theory*, Teori Sosiologi, dari Teori Klasik Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, penerjemah Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Susetya, Wawan, 2008, *Menyelami Samudera Ilmu Hikmah, Mendalami Rahasia Batin yang Memberikan Pencerahan Bagi Kaum Muslimin*, Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Tilaar, H.A.R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo
- Turner, V 1974, *Drama, Field, and Mataphors*, Ithaca, N.Y: Cornell University Press.

Turner, Bryan. S, 2006, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana Atas : Islam Vis A Vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme dan Globalisme*, Yogyakarta, Ar Ruzz.

Weber, Max, 2009, *Essays in Sociology*, Sosiologi, Penerjemah Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Witular, Rahmat, 2004, *Jalan Menuju Ketenangan Batin*, Jogjakarta: Pustaka Pesantren.

[www. KebumenKab.go.id](http://www.KebumenKab.go.id)

Zuhairini, dkk., 2008, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

## BIODATA PENELITI

1. H.Muhammad Bahrul Ilimie,S.Ag.M.Hum (Ketua Tim Peneliti)
  - a. NIY : 09511 (Status Dosen Tetap IAINU Kebumen)
  - b. Pangkat/ Jabatan : Lektor/ IIIId
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Tempat Tanggal lahir : Amuntai 21 Maret 1971
  - e. Alamat : Jl. Mayjend. Sutoyo No. 61 B Kebumen 54311
  - f. No Telpn/Hp : 08122768278
  - g. Email [hmb.ilmie@gmail.com](mailto:hmb.ilmie@gmail.com)
  - h. Riwayat Pendidikan :  
S1 Fakultas Syari'ah UII Yogya karta,  
S2 Hukum Islam UII Yogyakarta  
Kandidat Doktor Hukum Islam PDHI-FIAI UII Yogyakarta
  - i. Pengalaman Penelitian :
    - Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Yuridis
    - Peran Porda Walhi DIY dalam Proses Sistem Amdal dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.
    - KHI dan Upaya Pengintegrasian Hukum Islam ke dalam SHN Indonesia
    - Agama dan Politik (Studi Tentang Majelis Dzikir Ghofilin "Mantab" Kabupaten Kebumen sebagai Media Silaturahmi Politik)
  
2. Slamet Mujiono.S.Ag.M.Hum (anggota)
  - a. NIY : 09510 (Status Dosen Tetap IAINU Kebumen)
  - b. Pangkat/ Jabatan : Lektor/ IIIId
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Tempat Tanggal lahir : Jakarta 7 Juli 1966
  - e. Alamat : Permh. Sigaru Permai Gg Sakura 19 Kelurahan  
Kembaran kebumen Jawa Tengah
  - f. No Telpn/Hp 08157946744
  - j. Email: [slm.mujiono@gmail.com](mailto:slm.mujiono@gmail.com)
  - g. Riwayat Pendidikan :
    - S1 Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta,
    - S2 Hukum Islam UII Yogyakarta,
    - Kandidat Doktor Hukum Islam PDHI-FIAI UII Yogyakarta
  - h. Pengalaman Penelitian :
    - Sistem Hisab Rykyat di Indonesia Departemen Agama dalam menetapkan bulan-bulan Komari'ah di Indonesia
    - Sumbangan Hukum Islam dan Hukum Hindia Belanda terhadap Hukum di Indonesia paska Kemerdekaan 1945
    - Pelaksanaan Labelisasi dan Sertifikasi Halal di Indonesia (studi analisis Undang-undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan)
    - Metode Fatwa Nahdlatul Ulama di Indonesia pada Batshul Masail NU kurun waktu Fatwa tahun 2000-2010.

- Rekontruksi Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah terhadap Fatwa Kontemporer di Indonesia.
- Tanggapan Ulama Kebumen terhadap perbedaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia.
- Pemahaman Ulama di Kebumen terhadap Bank dengan sistem Bagi Hasil (Syari'ah)

## **PERSONALIA**

### **H.Muhammad Bahrul Ilmie,S.Ag.M.Hum (Ketua Peneliti)**

Keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian adalah sebagai penggiat aspek-aspek hukum nasional dan hukum Islam

### **Slamet Mujiono.S.Ag.M.Hum (anggota)**

Keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian adalah sebagai penggiat ekonomi Islam khususnya dan hukum ekonomi umumnya